

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

**(Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Mojokerto)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**ZUMROTUS SHOLIKAH
NIM.145030101111129**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya”

(Man Jadda Wa Jadda)

“Lakukan pilihanmu dengan sungguh-sungguh,
Maka akan mendapatkan yang diinginkan.
Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan”.

(Zumrotus)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). (Studi pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Mojokerto)

Disusun oleh : Zumrotus Sholikhah

NIM : 145030101111129

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -



Malang, 28 Mei 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Heru Ribawanto, M.S
NIP. 19520911 197903 1 002

Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 19620401 198703 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 30 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Zumrotus Sholikhah

NIM : 145030101111129

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Juli 2018

Waktu : 08.00 – 09.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Zumrotus Sholikhah

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojoketo)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Drs. Heru Ribawanto, M.S
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota

Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 19620401 198703 1 003

Anggota

Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
NIP. 194508171974122001

Anggota

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.SI
NIP. 19530807 197903 2 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Dwasik (Alm) dan Kepada Orang tua angkat saya Bapak Ropian. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Sa'adah (Almh) dan Orang tua angkat saya Ibu Siti Romlah. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara-saudara saya, Yunia Daniati, Cicik Mamlu'ul Hikmah dan Bahagia Nastiti, yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penelitian ini.

RINGKASAN

Zumrotus Sholikhah, 2018. **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Drs. Heru Ribawanto M.S dan Drs. Romula Adiono M.AP. 159 halaman + xv

Perdagangan menjadi primadona di Kota Mojokerto, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang sulit dalam mencari pekerjaan, sektor informal menjadi alternatif mereka, salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima (PKL). Banyak upaya Pemerintah dalam mengembangkan pedagang kaki lima (PKL). Tetapi pada kenyataannya, solusi kebijakan yang diberikan Pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan masih terdapat banyak permasalahan dalam proses yang dilakukan pemerintah dalam segi penataan, pengaturan, dan pembinaan pedagang kaki lima. Mengacu pada masalah diatas Pemerintah membuat kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Lokasi penelitian adalah di Kota Mojokerto. Situs penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam, dan kamera. Analisis data dalam penelitian ini model dari Milles dan Hiberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Penataan pedagang kaki lima di Mojokerto masih banyak terdapat permasalahan, baik yang berasal dari Pemerintah Kota maupun dari pedagang kaki lima (PKL). Oleh sebab itu untuk mengukur Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Mojokerto sudah berhasil atau tidak maka peneliti menggunakan Model Implementasi George C.Edward III yaitu melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti salah satunya adalah keterbukaan dalam hal anggaran. Pemerintah harus lebih tegas untuk memberi sanksi pada pedagang kaki lima yang melanggar. Melakukan pendekatan secara personal sehingga bisa menampung aspirasi para pedagang kaki lima.

SUMMARY

Zumrotus Sholikhah, 2018. Implementation of Local Government Policy in Organizing The Street Vendors (A Case Study at Industrial and Trading Agency and Civil Service Police Unit of Mojokerto City). Final Report. Public Administration Department, Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya. Supervisors: Drs. Heru Ribawanto, M.S and Drs. Romula Adiono M.AP 159 pages + xv

Trading become prima donna in Mojokerto City, it is caused by the societies difficult to find work, informal sector become alternative, one of them become street vendor. Many governmental efforts in developing street vendors. But in the fact, the policy solution given by government not success fully. It is caused many problems in the process done by government in the organizing, and developing the street vendors. Refer to the problems above then the government make policy given in Local Regulation No 5 Year 2005 about The Organizing and Developing of Street Vendors in Mojokerto City.

The research method used is qualitative research with descriptive approach. Through the research, it is expected can be known the Implementation of Local Government Policy in Organizing The Street Vendors. The research location is Mojokerto City. The research site is Industrial and Trading Agency and Civil Service Police Unit. The data collection technique by documentation, interview, and observation. The research instrument used is the researcher, interview guidance, notes, recorder and camera. Data analysis in the research is model from Miles and Hibberman.

The results showed that in the implementation, the governmental policy in organizing the street vendors in Mojokerto city has many problems, either from the City Government or from the street vendors. Because of that to measure the policy made by city government of Mojokerto has succeed or not then the researcher used implementation model from George C Edward, through communication, resources, disposition, bureaucracy structure.

From the results, there are several suggestion can be given by the researcher, such as the openness in the budget. Government should more firm in giving sanction to the violating street vendors. Conduct approach personally so able to contain aspiration from the street vendors.

Keywords: policy implementation, street vendors

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Duasik (Alm) dan Ibu Saadah (Almh)
2. Orang tua angkat penulis Bapak Ropian dan Ibu Siti Romlah yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
3. Kepada Kakak tersayang Abdul Ghofur dan Intan Yudha yang selalu meberikan semangat kepada penuli
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

5. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Bapak Dosen Pembimbing Drs. Heru Ribawanto M.S dan Bapak Drs. Romula Adiono M.AP yang telah bersedia membimbing penulis dengan penuh ketelatenan
7. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin dan Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi M.SI selaku dosen penguji yang telah meluluskan saya dengan nilai yang memuaskan
8. Bapak Fadhillah Amin selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Keluarga Besar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
11. Sahabatku yaitu sayangku yaitu Yunia Daniati, Bahagia Nastiti dan Cicik Maamlu'ul Hikmah serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa, serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Kebijakan Publik	12
2. Makna dan Karakteristik Publik.....	14
3. Ciri-ciri umum Kebijakan Publik.....	15
4. Unsur-unsur Kebijakan Publik.....	16
5. Sistem Kebijakan Publik.....	17
B. Proses dan jenis Kebijakan Publik	22
1. Tahap dalam Proses Kebijakan Publik	22
2. Jenis Kebijakan Publik	26
C. Implementasi Kebijakan.....	28
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	28
2. Pendekatan Implementasi	28
3. Model-model Kebijakan.....	30
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan.....	35
D. Pemerintah Daerah	37
1. Otonomi Daerah	37
2. Pemerintah Daerah	38
E. Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangan Kota	39

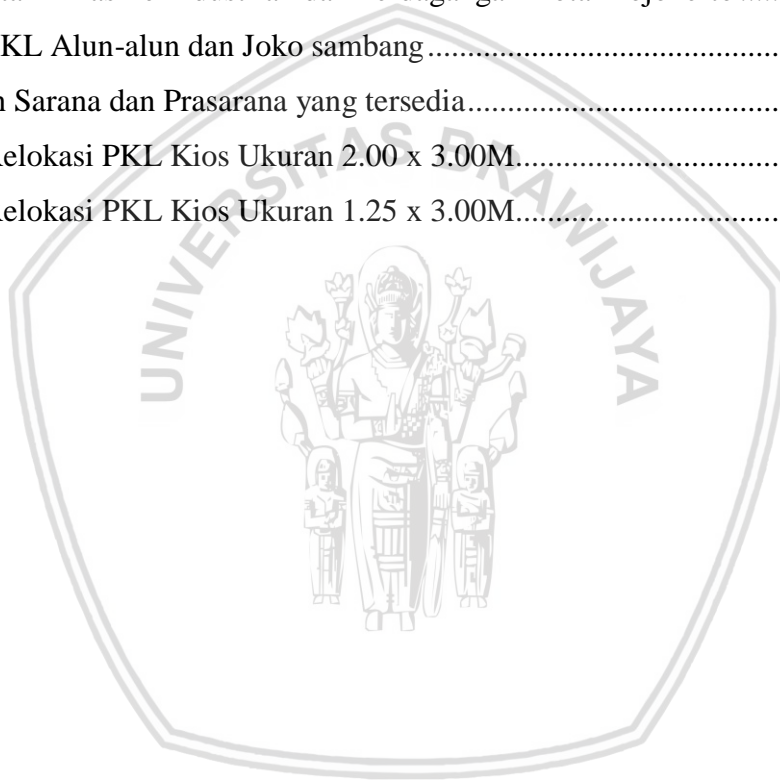
1. Pengertian Kota.....	39
2. Pertumbuhan dan Perkembangan Kota	40
F. Sektor Informal	42
1. Pengertian dan ciri-ciri sektor Informal	42
2. Terbentuknya Sektor Informal	44
3. Pedagang kaki lima bagian dari sektor informal	45
a. Pengertian Pedagang Kaki Lima	45
b. Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima	45
c. Jenis Pedagang Kaki Lima	46
d. Pola Penyebaran Aktivitas Pedagang Kaki Lima.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
1. Data Primer	53
2. Data Sekunder	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Wawancara.....	55
2. Observasi	55
3. Dokumentasi	56
F. Instrumen Penelitian	56
1. Peneliti Sendiri.....	57
2. Pedoman Wawancara	57
3. Perangkat Penunjang.....	57
G. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Mojokerto	59
a. Kondisi Geografis.....	59
b. Kondisi Demografis	60
c. Kondisi Ekonomi Kota Mojokerto	61
B. Gambaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.....	64
1. Visi dan Misi	64

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto	67
1. Tujuan dan Sasaran	68
D. Penyajian Data	68
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kota mojokerto menggunakan model Implementasi George C. Edward	69
a. Komunikasi	75
1. Tranmisi	75
2. Kejelasan	84
3. Konsistensi	87
b. Sumber Daya	90
1. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Staf	90
2. Sumber Daya Informasi	92
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	94
4. Sumber Daya Anggaran	96
c. Disposisi	98
d. Struktur Birokrasi	102
1. Standar Operating Procedures (SOPs)	102
2. Wewenang	103
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah dalam Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto	104
a. Faktor Pendukung Kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto	104
1. Sarana dan Prasarana	104
2. Sosialisasi	105
3. Pengawasan	107
b. Faktor Penghambat Kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto	109
1. Ketersediaan lahan	109
2. Anggaran	110
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan	111
4. Tingkat pendidikan rendah	112
F. Analisis Data	114
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kota Mojokerto berdasarkan model implementasi George C. Edward	114
a. Komunikasi	116
1. Tranmisi	119
2. Kejelasan	112
3. Konsistensi	121
b. Sumber Daya	122
1. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Staf	122
2. Sumber Daya Informasi	123
3. Sumber daya sarana dan prasarana	124

4. Sumber daya anggaran	124
c. Disposisi	125
d. Struktur Birokrasi.....	126
1. Standar Operating Procedures (SOPs)	126
2. Wewenang.....	127
2. Faktor Pendukung dan Penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kota Mojokerto	128
a. Faktor Pendukung implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kota mojokerto	128
1. Sarana dan Prasarana.....	128
2. Sosialisasi.....	129
3. Pengawasan	129
b. Faktor Penghambat implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kota mojokerto	130
1. Ketersediaan lahan	130
2. Anggaran	131
3. Kurang tegasnya sanksi	132
4. Tingkat pendidikan rendah.....	133
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	142

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2017	3
4.1 Data Keseluruhan PKL Kota Mojokerto	73
4.2 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto	91
4.3 Data Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	91
4.4 Data PKL Alun-alun dan Joko sambang	93
4.5 Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	94
4.6 Data Relokasi PKL Kios Ukuran 2.00 x 3.00M	96
4.7 Data Relokasi PKL Kios Ukuran 1.25 x 3.00M	96

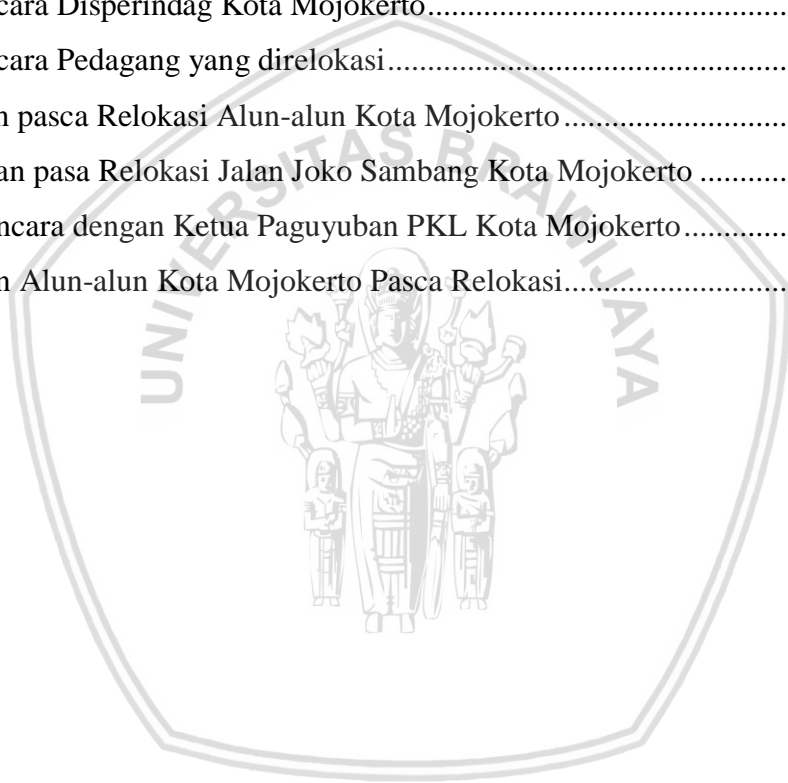


DAFTAR GAMBAR

2.1 Sistem Kebijakan	17
2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	22
3.1 Komponensial analisis model interaktif Miles & Hiberan.....	58
4.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	66
4.2 Keadaan Lalu Lintas Kota Mojokerto.....	72
4.3 Aksi Protes PKL Kota Mojokerto	74
4.4 Kondisi di dalam Alun-alun Kota Mojokerto	76
4.5 Kondisi pada luar Alun-alun Kota Mojokerto	76
4.6 Aksi protes PKL Mojokerto PKL Alun-alun Mojokerto	78
4.7 Kondisi saat dilakukan perundingan	79
4.8 Jalan Benteng Pancasila	81
4.9 PKL yang masih bandel berjualan ditempat terlarang	85
4.10 Wawancara dengan ketua paguyuban PKL Kota Mojokerto	89
4.11 Mobil razia Satpol PP Kota Mojokerto	95
4.12 Kerangka Lapak	95
4.13 Penertiban PKL Kota Mojokerto	99
4.14 PKL yang tetap bandel.....	100
4.15 Wawancara dengan PKL yang direlokasi	100
4.16 Penjual Baju	101
4.17 Kios Ukuran 2.00 x 3.00M.....	105
4.18 Kios Ukuran 1.25 x 3.00M.....	105
4.19 Kondisi saat Sosialisasi	106
4.20 Pengontrolan Satpol PP Kota Mojokerto	107
4.21 Kondisi Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Mojokerto	108
4.22 Kondisi Kesremawutan PKL Kota Mojokerto	109
4.23 Alur Komunikasi Implementasi Kebijakan Penataan PKL Kota Mojokerto	117

DAFTAR LAMPIRAN

1. Interview Guide.....	143
2. Surat Rekomendasi Penelitian.....	144
3. Surat Riset/Survey.....	145
4. Curriculum Vitae.....	146
5. Data Relokasi PKL Kota Mojokerto	147
6. Wawancara Satpol PP Kota Mojokerto	157
7. Wawancara Disperindag Kota Mojokerto.....	157
8. Wawancara Pedagang yang direlokasi.....	157
9. Keadaan pasca Relokasi Alun-alun Kota Mojokerto	158
10. Keadaan pasa Relokasi Jalan Joko Sambang Kota Mojokerto	158
11. Wawancara dengan Ketua Paguyuban PKL Kota Mojokerto	159
12. Keadan Alun-alun Kota Mojokerto Pasca Relokasi.....	159



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan oleh suatu Bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Kemajuan suatu bangsa dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan nasional pada segala bidang. Salah satu wujud pembangunan nasional adalah melalui kebijakan pembangunan perkotaan. Pembangunan perkotaan sebagai implementasi kebijakan, harus tetap mengacu pada tercapainya tujuan pembangunan nasional. Konsep pembangunan perkotaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembangunan pada umumnya, namun dalam hal ini kota hanya sebagai sasaran dari pembangunan. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Secara umum istilah kebijakan "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2002:16) mendefinisikan :

“Kebijakan sebagai satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Pembangunan Perkotaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat. Pembangunan perkotaan di daerah di pilih melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pembangunan terhadap Kotanya. Pembangunan tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui kebijakan pada bidang pendidikan, perdagangan, kesehatan, pariwisata dan sebagainya. Potensi bidang perdagangan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan perkotaan yang dapat diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

Sektor Perdagangan menjadi salah satu sektor terpenting dalam roda perekonomian. Salah satunya adalah di Kota Mojokerto. Berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan, terdapat cakupan dimensi yang sangat luas. Banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, Khususnya dipusat kota menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan penggunaan tanah kota. Berbagai fasilitas dan lapangan kerja yang lebih bervariasi membuat kota menjadi tempat yang menarik bagi masyarakat di luar kawasan perkotaan. Hal ini menyebabkan kota banyak dihuni oleh pendatang dari luar kota itu sendiri.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jatirejo	22.257	21.572	43.829
2	Gondang	27.761	21.516	43.277
3	Pacet	29.565	29.315	58.880
4	Trawas	15.433	15.368	30.801
5	Ngoro	40.863	41.018	81.881
6	Pungging	39.020	38.621	77.641
7	Kutorejo	33.127	32.211	65.338
8	Mojosari	39.941	39.144	79.085
9	Dlanggu	28.382	28.090	56.472
10	Bangsals	26.147	25.617	51.764
11	Puri	38.521	37.883	76.404
12	Trowulan	37.979	37.063	75.042
13	Sooko	37.043	36.311	73.354
14	Gedeg	29.643	29.435	59.078
15	Kemlagi	29.756	29.784	59.540
16	Jetis	43.591	42.095	85.686
17	Dawarblandong	26.006	26.332	52.338
18	Mojoanyar	25.107	24.742	49.849
Jumlah		564.142	556.117	1.120.259

Sumber: BPS Kota Mojokerto

Sebagian besar penduduk Kota Mojokerto pekerjaannya adalah sebagai pedagaag. Penduduk yang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup akan melakukan apa saja yang dapat digunakan untuk dapat bertahan hidup, salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran yaitu pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima (PKL) melakukan usahanya dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pedagang kaki lima (PKL) cenderung mengelompok dengan pekerjaan sejenisnya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat

mudah dijumpai seperti dipinggir jalan, trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, dan di dekat pusat keramaian kota yang seharusnya tidak digunakan untuk berdagang. Selama ini Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh Pemerintah Kota. Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan Kota. Ada beberapa tempat di kota Mojokerto yang menjadi lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti di alun-alun Mojokerto, Joko sambang, serta tiga kawasan tertib lalu lintas yakni di kawasan jalan bhayangkara, jalan majapahit, dan jalan residen pamuji.

Pemerintah Daerah Kota Mojokerto mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL) tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan merelokasi, serta mengusir atau menyingkirkan usahanya dengan guna pengembangan Kota. Untuk itu, setiap pemerintah Daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu operasi atau razia kepada sektor informal yang terkenal dengan operasi ketertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan tersebut memuat penataan kota untuk memberi fasilitas penempatan dagang terhadap pedagang kaki lima (PKL), dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan kemungkinan para pedagang kaki lima untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota Mojokerto sebagai kota yang aman, tertib, aman, dan indah. Menanggapi masalah tersebut maka Kota Mojokerto memiliki Peraturan Daerah No.5 Tahun

2005 tentang penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). (Pasal 2 Ayat

1) yang berisi:

”(1) Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, Kebersihan di Wilayah Kota Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar dan diatas saluran umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk kegiatan pedagang kaki lima atau yang sejenis (3) Walikota dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, trotoar dan saluran umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban Kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan keadaan pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan”.

Disebutkan juga pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun

2012 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Pasal 9 tentang kewajiban pelaku usaha antara lain:

”Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima, harus menyediakan dan menggunakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan”.

Pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang lebih kondusif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman perkotaan menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh hampir beberapa kota besar yang mengalami masalah dengan PKL, termasuk juga diantaranya kota kecil seperti Mojokerto. Wacana pemerintah daerah Kota Mojokerto untuk merelokasi PKL muncul disaat kebutuhan akan ruang publik di perkotaan yang semakin berkurang dan ketertiban lalu lintas yang kurang baik akibat kegiatan perdagangan yang dilakukan di badan jalan. Kesadaran untuk memenuhi kebutuhan akan ruang publik perkotaan menjadi mimpi besar kota Mojokerto yang semakin hari mengalami penurunan kualitas

lingkungan. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kebijakan untuk menjadikan ruang-ruang publik berfungsi sebagaimana mestinya seperti trotoar, badan jalan, dan taman kota. Kebijakan tersebut diambil didasari oleh peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pusat Perdagangan Kaki Lima di Kota Mojokerto dan Peraturan Daerah yang telah diatur dalam sumber hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah Mojokerto telah membahas permasalahan yang ada , Maka Pemerintah Kota Mojokerto memberi jalan keluar yaitu dengan Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah yakni upaya relokasi menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun Pemerintah ternyata melakukan relokasi dengan pembinaan yang sangat minim. Akibatnya tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) ini seringkali dianggap sulit dijangkau oleh para pembeli atau konsumen sehingga menjadikan PKL enggan untuk menempatnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal ini secara lebih mendalam, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut yaitu tentang **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto? Dengan menggunakan Model Implementasi George C. Edward III yang meliputi:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka penulis menyimpulkan Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diterima oleh semua pihak terutama pihak yang terkait dalam penelitian ini, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teknis maupun manfaat secara teoritis. Berikut merupakan kontribusi yang ingin dicapai adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Dapat dijadikan sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan khususnya bagi Pemerintah Kota Mojokerto. Serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

2. Kontribusi Praktis

Dapat dijadikan sebagai masukan mengenai upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL). Selain manfaat secara teoritis maupun praktis, juga terdapat manfaat-manfaat yang dirasakan bagi Pemerintah, masyarakat maupun pedagang kaki lima (PKL) diantaranya:

a) Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dapat dijadikan suatu pembelajaran yang akan dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan dan memberikan pencerahan untuk berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. Serta Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan dalam melakukan aktifitas dapat berjalan tertib,

aman, nyaman jika mengetahui aturan yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut

b) Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memahami eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL)

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh terutama yang berkaitan dengan persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL)

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2005 yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL).

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulisan akan dibagi menjadi lima Bab, sehingga apa yang dikemukakan akan lebih mudah dipahami. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan Latar Belakang mengenai suatu permasalahan tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto, dilanjutkan dengan rumusan

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka ini meliputi, kebijakan publik, implementasi kebijakan, pembangunan perkotaan, model-model implementasi, dinamika perkembangan dan pertumbuhan kota, pemerintah daerah, sektor informal, pedagang kaki lima (PKL).

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini yang menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif, dalam metode penelitian ini dilanjutkan dengan adanya fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi dari bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan data tentang judul yang diambil

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada penyelenggara program berdasarkan hasil temuan penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan dan Publik

H. Hugh Heglo dalam Said Zainal (2012;5) menyebutkan kebijakan sebagai "*a course of action intended to accomplish some end*" atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan itu. Isi yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk *dicapai* (*the desired ends to be achieved*); bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, tujuan yang hanya diinginkan saja bukanlah tujuan, melainkan sekedar keinginan. Setiap orang boleh memiliki keinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru dapat diperhitungkan jika ada usaha untuk mencapainya dan ada "*faktor pendukung*" yang diperlukan. Kedua rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat. Selanjutnya Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Oleh karena itu, isi

dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri.

Bertolak dari pengertian Heglo, Jones dalam Said Zainal (2012;6) merumuskan kebijakan sebagai suatu *"... 'Behavioral consistency and repetitiveness' associated with efforts in and through government to resolve public problems"* (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis yang nanti dalam bagian lain akan dibicarakan secara khusus dalam hubungannya dengan sifat dari kebijakan. Sejalan dengan perkembangan studi yang semakin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, ia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang telah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak mungkindipisahkan antara satu aspek dengan aspek yang lain.

Pengertian Publik dalam rangkaian kata public policy memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek,

kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah *"what government do or not to do."*. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi Lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik disini adalah masyarakat. Pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Menurut Said Zainal Abidin hal (2012;7-8).

2. Makna dan karakteristik kebijakan publik

Kebijakan (*policy*) pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose (1969) mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich (1963;79) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Anderson (1994: 5) mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan

dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Kata “plicity” umumnya digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang dibuat, baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi: “policy” adalah bebas dari kebanyakan konotasi yang tak diinginkan yang berdekatan dengan kata politik, yang sering kali diartikan ‘memihak’ atau ‘korupsi’ (Harold Laswell, dalam Persons, 1995: 16)

3. Ciri-ciri umum Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Said (2012:23) mengemukakan berberapa ciri dari kebijakan sebagai berikut. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekadar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.

- a. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum
- b. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah
- c. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan
- d. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

4. Unsur-unsur kebijakan

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan.

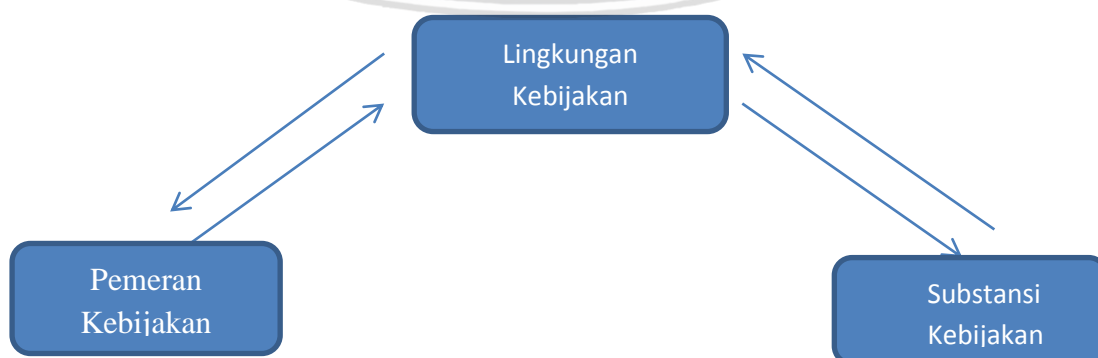
Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Namun demikian, tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaannya tidak hanya sekedar pada jangka waktu pencapaian tujuan yang dimaksud, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi, dan dukungannya. Unsur kedua dalam studi kebijakan adalah masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Unsur ketiga adalah tuntutan (demand). Sudah diketahui bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju (Huntington, 1990): 1) Partisipasi dapat berbentuk dukungan, tuntutan, dan tantangan atau kritik. Seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal, bergantung pada urgensi dari tuntutan, gerahnya masyarakat, dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut. Tuntutan muncul karena salah satu dari dua sebab. Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh

oemerintah dirasakan tidak menemui atau merugikan kepentingan mereka. Kedua, karena munculnya kebutuhan baru yang menyusl setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan. Unsur keempat dari suatu kebijakan adalah dampak (*outcome*). Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Unsur kelima dari kebijakan adalah sarana atau alat kebijakan (*policy instrumrnt*).

5. Sistem Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan sarana sekaligus pembedinglai pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan sifat ini kebijaan publik merupakan gambaran dari arah dan isi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan ersebut. Dalam hal ini kebijakan publik merupakan produk dari lingkungan pemerintahan, dan pada gilirannya, juga memberi pengaruh terhadap perkembangan lingkungan pemerintah trsebut. Keterkaitan antara ketiga hal ini disebut sebagai sistem kebijakan seperti terlihat pada gambar.

Gambar 2.1 Sistem Kebijakan



Sumber :Dunn dalam Muchlis (2014:54)

Sebagai produk dari lingkungannya, kebijakan publik merupakan gambaran pola tindakan pemerintahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam lingkungannya. Dengan pemahaman ini, suatu pemerintahan selalu dipersyaratkan untuk bersifat responsif terhadap setiap dukungan ataupun kebutuhan yang datang dari warga negara. Pada gilirannya, suatu pemerintahan juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola dukungan dan kebutuhan warga negara tersebut secara efisien, efektif, dan berkesinambungan. Sebaliknya, sebagai salah satu determinan perkembangan lingkungannya, kebijakan publik menjasi sarana pembentukan dan pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan. Dengan pernyataan itu, suatu pemerintahan secara tak terhindarkan adalah institusi pembentuk nilai-nilai warga negara, terutama melalui mekanisme pelayanan publik dan pembentukan kebangsaan dan karakter kewarganegaraan (*national and character building*).

a. Substansi Kebijakan

Sebagai suatu hasil proses penyelenggaraan pemerintahan, substansi kebijakan publik dapat dibedakan atas berbagai kelompok atau tipologi. Tipologi yang paling banyak diikuti oleh para ahli kebijakan publik adalah tipologi yang dibuat oleh Theodore J. Lowi. Menurut Lowi (dalam Anderson, 199: 11), kebijakan publik dapat dibedakan atas tiga tipe, yakni kebijakan *distributive*, kebijakan *redistributive*, dan kebijakan *regulatory*. Kebijakan distributif atau kadangkala juga disebut dengan istilah kebijakan alokatif adalah kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa bagi warga negara, baik secara perorangan maupun dalam wujud masyarakat. Kebijakan

redistributif adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaliran barang dan sumber daya dari satu kelompok warga negara kepada kelompok warga negara lainnya. Kebijakan ini bermula dari suatu pandangan bahwa suatu pemerintahan seharusnya melakukan perlakuan yang sama kepada semua warga negara, termasuk pemberian kesempatan berusaha. Dalam praktik, sejalan dengan kapasitas dan keberuntungan masing-masing warga negara, maka akan selalu terjadi adanya warga negara yang mampu dan berhasil dan warga negara yang tidak mampu dan kurang beruntung. Ketika kondisi ini terjadi, maka kewajiban pemerintah untuk menjamin nilai-nilai keadilan (*equity*) selalu tercermin dalam kehidupan masyarakat. Pencerminan dari kebijakan redistributif adalah pelaksanaan program yang berfokus pada pemenuhan kepentingan kelompok warga negara yang kurang beruntung.

b. Pemeran Kebijakan

Setiap kebijakan publik akan selalu melibatkan sekelompok orang dengan peran yang berbeda-beda. Sebutan publik, yang juga mencakup makna berlingkup kelompok, lebih memperjelas bahwa substansi suatu kebijakan publik bersifat terbatas. Pemeran kebijakan adalah semua individu atau kelompok yang terlibat, baik dengan peran mempengaruhi ataupun dengan peran dipengaruhi, dalam suatu proses kebijakan. Andeson (1994; 54 dan 63) membedakan pemeran kebijakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebutnya sebagai pembuat kebijakan formal, yang terdiri atas: legislatif, eksekutif, dan pengadilan. Kelompok kedua disebutnya sebagai partisipan informal yang mencakup: kelompok kepentingan, partai politik, organisasi

penelitian, media massa, perguruan tinggi, dan warga negara. Howlet dan Rames (1995: 59-78) menjelaskan pemeran kebijakan secara institusional, dan dibedakan atas tiga institusi, yakni negara, masyarakat, dan organisasi internasional.

Sebagai pemeran kebijakan publik yang formal, legislatif terlihat dalam tugas-tugas politik sentral berupa pembuatan undang-undang dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Fungsi legislatif mencakup representasi opini dan kepentingan, formulasi kebijakan, kontrol keuangan, supervisi eksekutif, dan pembuatan undang-undang (Hitchner dan Haebold, 1972: 279-293). Secara umum, struktur legislatif berwujud unikameral atau bikameral. Struktur unikameral menjadikan legislatif hanya berupa satu badan yang sekaligus berperan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah, sedangkan struktur bikameral menjadikan legislatif dalam dua badan, yakni *upper house* (mewakili wilayah) dan *lower house* (mewakili penduduk).

Pemeran kebijakan yang lainnya adalah eksekutif. Kapasitas eksekutif dalam menjalankan perannya pada proses pembuatan kebijakan publik akan banyak ditentukan oleh sistem politik dan pemerintahan yang berlaku, perilaku dan politik birokrasi, dan kondisi masyarakat. Kelayakan eksekutif dalam proses kebijakan publik juga bertalian dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat tersebut terutama menyangkut seberapa jauh masyarakat dapat memainkan peran aktif untuk menjamin bahwa kebijakan publik selalu relevan dengan pencapaian tujuan pemerintahan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

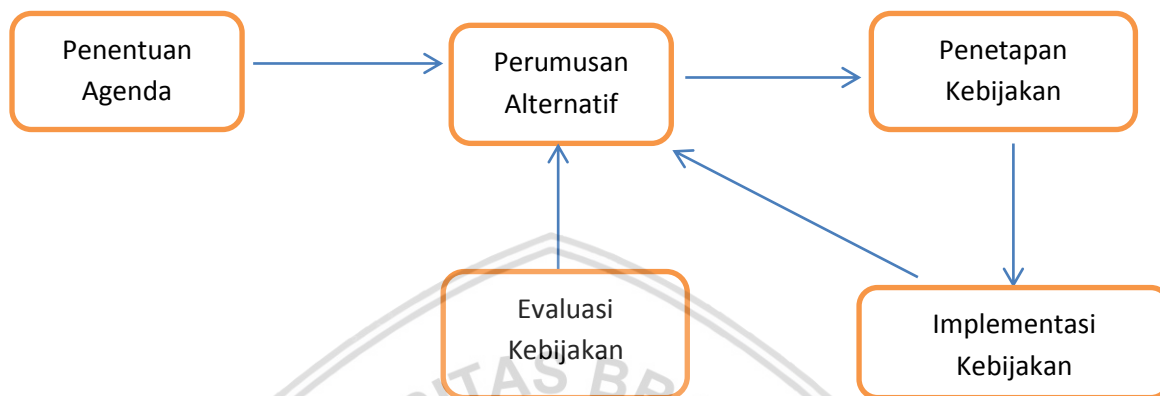
Pengadilan merupakan bagian dari yudikatif yang dinilai elevan dalam proses kebijakan publik. Pemeran formal dalam proses kebijakan publik ini berperan melalui kewenangannya untuk melakukan peninjauan kembali (judicial review) atas kebijakan yang ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif. Hasil dari proses tersebut pada dasarnya merupakan pengaturan kembali terhadap kebijakan publik yang menjadi objek peninjauan kembali. Howlet dan Rames (1995: 59) membahas pemeran kebijakan formal tersebut, yakni legislatif, eksekutif, dan pengadilan, dengan istilah institusi atau lembaga negara. Dengan pemahaman bahwa kebijakan publik ditetapkan oleh lembaga negara, maka kualitas lembaga negara akan sangat menentukan kualitas kebijakan publik bagi kepentingan warga negara. Ramesh dan Howlet (1995: 59) menyatakan bahwa kualitas lembaga negara ini akan ditentukan oleh otonomi dan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga negara tersebut.

c. Lingkungan Kebijakan

Secara umum, lingkungan kebijakan dalam praktik pemerintahan di Indonesia dikenal dengan sebutan "*asta-gatra*". Kedelapan dimensi tersebut dibedakan dalam dua kelompok, yakni yang bersifat fisik dan nonfisik. Kelompok fisik menyangkut tiga unsur, yakni letak geografis, kekayaan alam, dan jumlah penduduk, sedangkan kelompok nonfisik mencakup lima aspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan nasional.

B. Proses dan jenis Kebijakan Publik

1. Tahap dalam Proses kebijakan Publik



Gambar 2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Sumber : Muchlis Hamdi (2014:79)

Proses kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Walaupun rangkaian tahap ini tampak bersifat linear, dalam kenyataannya, tahap-tahap tersebut umumnya justru sebaliknya, yakni non-linear atau interaktif. Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut. Namun demikian, pada umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam lima tahap berikut :

a. Penentuan Agenda

Istilah agenda dalam kebijakan publik, diartikan sebagai daftar perihal atau masalah untuk mana pejabat pemerintah, dan orang-orang diluar perhatian srius pada saat tertentu (Kingdon, 1995). Dengan makna agenda tersebut, penentuan agenda merupakan proses untuk

menjadikan suatu masalah agar mendapat perhatian dari pemerintah. Kraft dan Furlong (2007:71) mendefinisikan penentuan agenda sebagai *how problems are perceived and defined, command attention, and get onto the political agenda* (bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan, perhatian, dan masuk menjadi agenda politik). Proses tersebut dimulai dari kegiatan pendefinisian masalah, yakni kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Isu-isu tersebut senyatanya merupakan keadaan yang berkembang di dalam masyarakat. Keadaan tersebut dirasakan oleh masyarakat atau sebagian besar masyarakat sebagai suatu ketidaknyamanan, yang kemudian memunculkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk mengubah keadaan tersebut melalui tindakan-tindakan pemerintah.

b. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan. Schattschneider (dalam Rochefort dan Cobb, 1993:57) sangat menggaris bawahi signifikansi tahap ini dengan menyatakan bahwa definisi alternatif kebijakan adalah instrumen kekuasaan yang sangat hebat (*the supreme instrument of power*). Kraft dan Furlong (2007: 71) menyatakan penentuan formulasi kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan

kebijakan tersebut. Dari pengertian itu terlihat bahwa paling tidak terdapat dua aktivitas utama dari formulasi kebijakan, yakni, pertama, perancangan tujuan kebijakan. Aktivitas tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan rumusan masalah kebijakan, namun perancangan tujuan kebijakan akan dapat berbeda dari rumusan masalah kebijakan, sejalan dengan dinamika yang berlangsung didalam dan diluar komunitas kebijakan, yang umumnya terdiri atas pejabat-pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan-badan penelitian, kelompok pemikir (*think tank*), dan wirausaha kebijakan. Kedua, Formulasi kebijakan sekaligus juga menyangkut strategi pencapaian tujuan kebijakan. Dengan aktivitas tersebut, terumuskan bahwa dalam setiap alternatif kebijakan, sejak awal perlu dirumuskan langkah-langkah yang selanjutnya dilakukan apabila alternatif tersebut dipilih menjadi kebijakan.

Perumusan alternatif kebijakan pada dasarnya adalah hasil dari kegiatan peramalan (*forecasting*) mengenai kondisi yang perlu atau dapat diwujudkan berkaitan dengan pemecahan masalah kebijakan. Objek yang dapat dijadikan substansi dari kegiatan peramalan, oleh Dunn (1981 : 146) dikelompokkan menjadi empat yakni konsekuensi kebijakan yang sedang berlaku, konsekuensi kebijakan baru, isi kebijakan baru, dan perilaku stakeholder.

c. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan kebijakan (*policy legitimation*) menurut kraft dan Furlong (2007 : 71) merupakan mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan (*enactment*) kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan. Pertama, penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Kedua, penetapan kebijakan berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternatif-alternatif yang tersedia. Tahap ini juga berkenaan dengan legitimasi dari alternatif yang dipilih, yakni berupa suatu rancangan tindakan-tindakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan

d. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Mengingat makna dan sifat implementasi yang dapat dipahami dari berbagai dimensi, maka tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikansiya.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Dengan fokus tersebut, evaluasi kebijakan akan menyediakan umpan balik bagi penentuan keputusan mengenai apakah kebijakan yang ada perlu diteruskan atau dihentikan. Namun terdapat juga pandangan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekadar menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat menyangkut perspektif yang lebih luas, antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Thomas R.Dye (dalam Persons, 1995:545) bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik.

2. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. William N. Dunn (2000:21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

a. Masalah kebijakan

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum pernah terpuaskan. Tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. Alternatif Kebijakan

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. Tindakan Kebijakan

Suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai

d. Hasil Kebijakan

Merupakan akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e. Hasil Guna Kebijakan

Merupakan tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu dipecahkan kembali atau perumusan kembali.

C. Implementasi Kebijakan

1. Konsep implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Sementara itu, Van Meer dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil pemerintah.

2. Pendekatan implementasi

Menurut Said (2012:155) Proses implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistik atau dari atas ke bawah. Apa yang diimplementasikan adalah apa yang telah diputuskan. Sehubungan dengan kecenderungan dari implementasi yang bersifat sentralistik dan prinsip demokrasi, implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang menentukan.

b. Pendekatan prosedural atau manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis, implementasi tidak lain daripada langkah-langkah yang biasa dikenal dalam konsep planning, programming, budgeting, dan supervision (PPBS) atau programming, evaluation, dan review technique (PERT).

c. Pendekatan kejiwaan dan behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Di samping itu, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

d. Pendekatan politik

Dilihat dari pandangan ini, implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antar kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antarinstansi, yang dapat disebut sebagai politik dalam birokrasi. Menurut Hogwood and Gunn, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

3. Model-model Kebijakan :

1. Menurut Van meter dan Van horn dalam Winarno (2005:109-119)

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini ddidasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van Meer dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencaaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

b. Sumber-sumber kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan saaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumbe-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif

c. Komunikai antar organiasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan bergai sumber informasi.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Komponen model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasidan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Van Meter dan Van horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi “terbuka”
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.

f. Kecenderungan pelaksana

Setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

2. Model Implementasi menurut George Edward III:

Model implementasi kebijakan yang berprespektif *top down* yang dikembangkan oleh Edward dalam Agustino, (2016:136-142) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward dalam Agustino (2016:137) adalah komunikasi. Komunikasi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi atau penransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a) Tranmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*Misscommunication*).

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan dilapangan

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Edward dalam Agustino (2016:138). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi dan tidak memenuhi standar keahlian yang sesuai pada bidangnya
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan
- c) Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana adalah faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dapat melancarkan implementasi kebijakan
- d) Anggaran juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Banyaknya anggaran dapat mendukung semua pelaksanaan implementasi kebijakan. Anggaran dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward dalam Agustino (2016:136) adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward dalam Agustino (2016:140), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelambatan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Edward menjelaskan yang dapat menongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah dengan melakukan:

- a) Standar Operating Prosedure (SOPs), adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar diterapkan atau standar minimum yang dibutuhkan
- b) Fragmentasi, adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

a. Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002).

Faktor pendukung adalah hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997) yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit / bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Menurut Soenarko (2003) ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan, antara lain:

- a) Teori yang menjadi dasar kebijaksanaan itu tidak tepat
- b) Sarana yang dipilih untuk melaksanakan tidak efektif
- c) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d) Isi dari kebijakan bersifat samar-samar
- e) Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor ekstern
- f) Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan permasalahan teknis
- g) Adanya kekurangan akan tersediannya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumber daya manusia)

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

D. Pemerintah Daerah

1. Otonomi Daerah

Setelah lengsernya Orde baru kemudian lahir Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah terlahir juga karena adanya tuntutan dari masyarakat supaya pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik karena langsung ditangani oleh pemerintah daerah dan tidak lagi oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi bidang pemerintahan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata otonom memiliki arti “pemerintahan sendiri” (Badudu: 2001). Pengertian Otonomi dalam etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Latin “autis” yang artinya sendiri dan “nomos” yang bermakna aturan. Sehingga gabungan dari kedua makna tersebut adalah “pemerintahan sendiri” yaitu untuk mengatur rumah tangga sendiri. Sedangkan menurut Logemann dalam Wiyono (2006: 30), otonomi sebagai

kebebasan bergaerak yang diberikan kepa daerah otonom dengn tujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk). Prmerintah yang demikian ini dinamakan otonom.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun satu daerah mempunyai hak dan wewenang yang besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri bukan berarti dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya anpa memperhatikan peraturan yang berlaku, tetapi tetap ada batasan-batasan aturan yang harus dipatuhi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah

Menurut Pamuji (1989: 22) secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Pamudji mengartikan kata-kata tersebut sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintahan adalah khusus memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah)
- c. Pemerintahan adalah suatu perbuatan (cara,hal, urusan, dsb)

Pada bagian lain Pamudi (1989:25) merumuskan pengertian pemerintahan sebagai berikut:

“Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi atau badan-badan legislatif, esekutif, yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilaksanakan oleh organisasi eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara”.

E. Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

1. Pengertian Kota

Kota adalah kelompok orang-orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualis. Rumusan ini pada dasarnya merupakan perbandingan dari berbagai macam pendekatan terhadap kota. Pendekatan geografis memandang kota sebagai tempat konsentrasi sejumlah penduduk, sekalipun sulit untuk menetapkan besarnya jumlah penduduk tersebut. Pendekatan ekonomis memandang kota sebagai titik pertemuan lalu lintas ekonomi, tempat berpusatnya perdagangan, industri dan kegiatan-kegiatan non-agraris lainnya, di mana peredaran uang cepat sekali dan volume uang yang beredar hampir-hampir tak terbatas apabila dibandingkan dengan desa. Pendekatan sosiologi sering membedakan masyarakat kota dari masyarakat desa dengan menggunakan ukuran perbedaan jabatan, yaitu beraneka macamnya jabatan-jabatan dalam kota sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan desa, ukuran heterogenitas kegiatan, di mana kegiatan

masyarakat kota bersifat heterogeen sedangkan kegiatan masyarakat desa bersifat homogeen. Pendekatan sosio-psikologis lebih memusatkan perhatian pada sifat hubungan sesama anggota masyarakat, dimana dinyatakan bahwa hubungan tersebut bagi masyarakat kota bersifat rasional impersonal dan tidak intim, sedangkan bagi masyarakat desa hubungan tersebut bersifat irrasional, personal dan intim. Menurut Pamuji (2012;5-7).

Pada umumnya kota diartikan sebagai suatu permukaan wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya dan administrasi pemerintahan. Kota mempunyai daya tarik yang relatif (sangat) kuat bagi penduduk yang berdomisili di luar kota yang bersangkutan, baik yang tersebar di daerah perdesaan maupun di kota-kota yang lebih kecil. Arus urbanisasi (kedaerah perkotaan) makin kuat. Daya tariknya dalam bentuk menjanjikan lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, taraf kehidupan yang lebih baik, memberikan peluang melanjutkan studi dan lainnya.

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Pertumbuhan dan perkembangan kota merupakan suatu istilah yang saling terkait, bahkan terkadang saling menggantikan, yang pada intinya adalah suatu proses perkembangan suatu kota. Pertumbuhan kota (urban growth) adalah perubahan kota secara fisik sebagai akibat perkembangan masyarakat kota. Sedangkan perkembangan kota (urban development) adalah perubahan dalam masyarakat kota yang meliputi perubahan sosial politik, sosial budaya dan fisik (Hendarto, 2001).

Menurut Kustiwan dalam Tjahjati (1997), pertumbuhan penduduk dan aktifitas sosial ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kota mendorong pertumbuhan kebutuhan akan lahan. Dan karena karakteristiknya yang tetap dan terbatas, maka perubahan tata guna lahan menjadi suatu konsekuensi logis dalam pertumbuhan dan perkembangan kota.

3. Dimensi Pertumbuhan Kota

Menurut Rahardjo (2015:81) Kota merupakan wadah berkelompoknya penduduk serta berbagai kegiatannya dalam bidang ekonomi dan sosial. Munculnya kota dalam peradaban manusia sudah sejak berabad-abad yang lalu, mulai dari bentuk tempat persinggahan pedagang, berkembang, menjadi kelompok pemukiman, kemudian terbentuk kota kecil, kota menengah dan kota besar, seperti keadaannya sekarang. Permasalahan kota sangat luas dan meliputi banyak aspek karena menyangkut kehidupan manusia (penduduk) yang terdiri dari kebutuhan jasmani, spiritual, dan kemasyarakatan.

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan kota:

a. Konsep Heartland dan Hinterland

Heart (dalam bahasa Inggris) berarti jantung hati. Jantung hati adalah pusat kehidupan dari tubuh seseorang. Land adalah tanah atau dapat diartikan pula daerah. Heartland diartikan sebagai daerah pusat kehidupan perekonomian. Kehidupan perekonomian meliputi kegiatan perdagangan dan industri, yang terkonsentrasi pada suatu tempat atau daerah. Heartland dapat dikonosasikan dengan pengertian “pusat” kegiatan ekonomi, yang dapat diberikan sebutan bermacam-macam sesuai dengan penekanan

fungsi, misalnya sebagai pusat pembangunan, pusat pertumbuhan, pusat jasa distribusi atau simpul jasa distribus (yang sering disingkat dengan simpul).

4. Ketertiban Umum kota

Ketertiban umum memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam undang-undang No. 6 tahun 2010 dalam pasal 1 ayat 10 dijelaskan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertam, tertib, dan teratur. Sedangkan menurut Kusumohamidjojo (2004:166) ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keteriban umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.

F. Sektor Informal

1. Pengertian dan ciri-ciri sektor informal

Wirosardjono (1979) mengemukakan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut.

1. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, pemodal, maupun penerimaan
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya sering dilakukan “liar”
3. Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian
4. Tidak mempunyai tempat tetap
5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah

6. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja
7. Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama
8. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

Todaro dan Abdullah (Manning.1991) menyebutkan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut:

1. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktivitas-aktivitas jasa yang dimiliki keluar perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana
2. Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal yang tinggi
3. Produktivitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada di sektor informal
4. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pensiun
5. Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal
6. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat hidup (*survive*), bukannya untuk mendapatkan keuntungan dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan
7. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan dan meskipun begitu mereka bekerja dengan waktu yang panjang
8. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*) dan pemukiman (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi, serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan.

Menurut Sethuraman (Manning, 1991) dalam Paulus (2007:108-109)

mengatakan, sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Akan tetapi, sektor informal tidak bisa disebutkan sebagai “perusahaan” berskala kecil. Sektor informal terutama dianggap sebagai manifestasi dari suatu pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Mereka memasuki kegiatan berskala kecil di kota, terutama

bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan karena mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran.

2. Terbentuknya sektor Informal

Terjadinya lonjakan jumlah penduduk kota adalah berduyun-duyunnya orang yang datang dari desa atau daerah ke kota besar, atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi, selain karena penambahan penduduk alami kota itu sendiri yang relatif kecil angkanya. Sedangkan akibat penduduk kota yang melonjak adalah terdapat kelompok-kelompok masyarakat di kota dengan berbagai macam ragam. Ada lapisan masyarakat atas, menengah, dan bawah. Lapisan masyarakat menengah atas umumnya mampu memasuki sektor formal karena memiliki keterampilan, tingkat pendidikan yang cukup dan akses yang dimilikinya. Lapisan masyarakat menengah ke bawah dengan keterampilan, pendidikan, dan akses yang terbatas peluang untuk memasuki sektor formal sangat terbatas. Akhirnya mereka menggeluti sektor informal yang tidak mensyaratkan kriteria yang berlebihan. Dengan modal terbatas, ditambah dengan keterampilan dan keuletan, mereka mampu bertahan hidup di perkotaan.

Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki lima : menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak, warung kelontong dalam gerobak, menjual minuman dan makanan di tempat keramaian, berjualan mainan anak-anak, berjualan alat-alat kebutuhan pelengkap.

3. Pedagang Kaki Lima Bagian dari Sektor Informal

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) didefinisikan sebagai orang yang menawarkan barang untuk dijual ke umum tanpa memiliki struktur bangunan yang permanen (Bhowmik, 2005).

Pedagang kaki lima merupakan gambaran yang sering kita jumpai dan lihat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik disebut Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 nomor 1 dijelaskan bahwa :

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

b. Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) dapat dikelompokkan dalam 2 pola yaitu :

1. Pola Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

Pedagang Informal jenis ini umumnya selalu memanfaatkan aktivitas sektor formal yang berada pada pusat perbelanjaan yang menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumen. Selain itu pada ujung jalan, ruang terbuka, tempat parkir, taman dan lain sebagainya

merupakan lokasi yang diminati oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini banyak dipengaruhi adanya pertimbangan aglomerasi yaitu pemusatan atau pengelompokkan pedagang sejenis atau yang menjual komoditas yang sama seperti para pedagang makanan dan minuman.

2. Pola Memanjang (*Linier Concentration*)

Pola ini terjadi disepanjang atau pinggir jalan utama maupun pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Pola kegiatan lebih banyak dipengaruhi pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Di lihat dari segi pedagang, hal ini cukup menguntungkan sebab dengan menempati lokasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi maka kesempatan untuk memperoleh konsumen juga tinggi. Jenis dagangan yang diperdagangkan antara lain pakaian, buah-buahan, obat-obatan dan lain sebagainya.

c. Jenis Pedagang Kaki Lima (PKL)

Karafir (1997) juga mengemukakan ciri-ciri pedagang kaki lima yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (1997) menggolongkan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi 10 kelompok : 1) Pedagang sayur dan rempah, 2) Pedagang kelontongan, 3) pedagang makanan dan minuman, 4) pedagang tekstil, 5) pedagang surat besar, 6) pedagang daging dan ikan, 7) Pedagang loak, 8) Pedagang rokok, 9) Pedagang beras, 10) Pedagang buah-buahan.

Berbeda dengan Kartini Kartono dalam Sovia (2005) yang mengemukakan pendapatnya tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan, emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

d. Pola pelayanan Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pola pelayanan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) adalah cara belokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasrkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL dapat ditinjau dari aspek sifat dan golongan pengguna jasa. Berdasarkan sifat pelyanannya, pedagang kaki lima menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Pedagang Menetap (*static*)

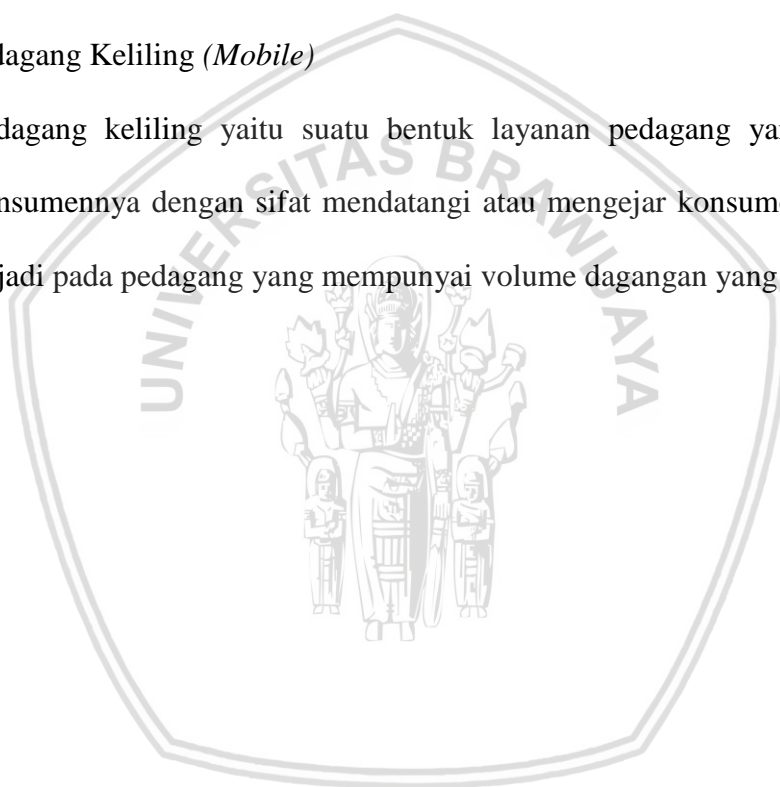
Pedagang Menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti biasanya berupa kios atau gerobak beratap

2. Pedagang Semi Menetap

Pedagang semi menetap merupakan suatu pelayanan pedagang yang mempunyai sifat menetap sementara yaitu hanya pada saat tertentu saja. Dalam hal ini Pedagang Kaki Lima (PKL) akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Bila tidak ada maka mereka cenderung berjualan dengan berkeliling.

3. Pedagang Keliling (*Mobile*)

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang melayani konsumennya dengan sifat mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya terjadi pada pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Kebijakan pemerintah Daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Mojokerto. Bogdan dan Taylor dalam Almanshur, F & Ghony, M.D (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Oleh karena itu data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat singkat dan jelas, guna mempermudah pembaca dalam memahaminya. Untuk memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, dilapangan proses pendekatan kepada informan dilakukan dengan cara memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang dalam situasi yang berbeda-beda.

B. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karena fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang akan diteliti. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya volume data yang diperoleh dilapangan.

Menurut Moleong (2006:12) mengatakan bahwa “penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu: pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Adapun fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto meliputi Menggunakan model Implementasi George C. Edward III yang meliputi:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur birokrasi
2. Faktor Pendorong dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto meliputi:

a. Faktor Pendukung

1. Sarana dan Prasarana
2. Sosialisasi
3. Pengawasan

b. Penghambat

1. Ketersediaan Lahan
2. Anggaran
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk PKL
4. Tingkat Pendidikan Rendah

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi dari objek yang diteliti sehingga dapat memperoleh informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Meleong (2012) menyatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi agar peneliti mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Mojokerto. Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena akan mempermudah mendapat data yang sesuai. Alasan dalam pemilihan lokasi adalah karena di daerah perkotaan Mojokerto masih banyak dijumpai para pedagang kaki lima yang masih berjualan setelah terjadi penertiban dan penggusuran terutama yang ada dikawasan Alun-alun Mojokerto, Joko Sambang.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat sebenarnya peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, sehingga dapat memperoleh data dan informasi yang akurat untuk dapat menjawab permasalahan dari sesuai dengan fokus penelitian. Situs penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Peneliti mengambil situs penelitian ini karena, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berperan aktif dalam menangani masalah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Mojokerto.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder sangatlah diperlukan oleh peneliti untuk ketepatan berbagai informasi yang relevan dengan data mengenai variabel-variabel penelitian. Menurut Arikunto (2006:129) bahwa jenis data dalam penelitian terbagi menjadi berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh peneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti sumbernya, yaitu dari informan yang berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati melalui proses wawancara melalui perekaman video/audio *tapes*. Pengambilan foto atau film terhadap informan. Selain itu juga, yang dimaksud dengan data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk mencapai tujuan khusus. Data primer dapat diperoleh dari aktor yang terlibat. Adapun responden peneliti dalam pengumpulan data

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
- c. Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Mojokerto

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya diluar kata dan tindakan dan merupakan sumber kedua. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen resmi (Moleong,2005). Selain itu juga data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang ditelaah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah data yang asli. Data sekunder ini

berasal dari sumbernya dan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi. Data ini juga berasal dari informasi tertulis, laporan, literature, surat kabar, internet, dan media lainnya. Adapun sumber penelitian ini antara lain :

- a. Renstra Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto
- b. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
- c. Laporan data keberhasilan relokasi dari Kantor Pemerintahan Kota Mojokerto
- d. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 10 Tahun 2012
- e. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.5 Tahun 2005 tentang penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- g. Data Keberhasilan relokasi penertiban PKL dari Satuan Polisi Pamopng Praja Kota Mojokerto

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian karena dengan teknik pengumpulan data ini peneliti dapat memperoleh data yang diolah menjadi informasi untuk disajikan sebagai hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data menjadi empat bagian yaitu observasi, *interview*, dokumentasi dan gabungan dari ketiganya (*triangulasi*). Oleh karena itu untuk dapat memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2013:231)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber atau responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara terbuka dengan keterangan yang diterima melalui lisan. Teknik wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya. Dengan adanya teknik pengumpulan data dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi di daerah tersebut.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data-data mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dimaksud agar pertanyaan yang diajukan peneliti terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan serta suasana tetap terjaga agar terkesan dialogis dan informal.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu langkah melaksanakan survey atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang sudah ditentukan dengan mencari objek-objek yang telah direncanakan sebelumnya

kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2015:310) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dan kegiatan yang berlangsung. Dengan melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan atau apa yang ditelitinya kemudian dilakukann pencatatan atas pengamatan yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Doukmen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2015:329)

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian Menurut Arikunto (2006) adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti

untuk menggali data dari objek maupun subjek dalam proses pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti sendiri

Dalam sebuah penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara

2. Pedoman Wawancara

Merupakan materi atau poin-poin yang menjadi dasar melakukan wawancara dengan narasumber yang berupa daftar pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Pedoman wawancara berguna untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.

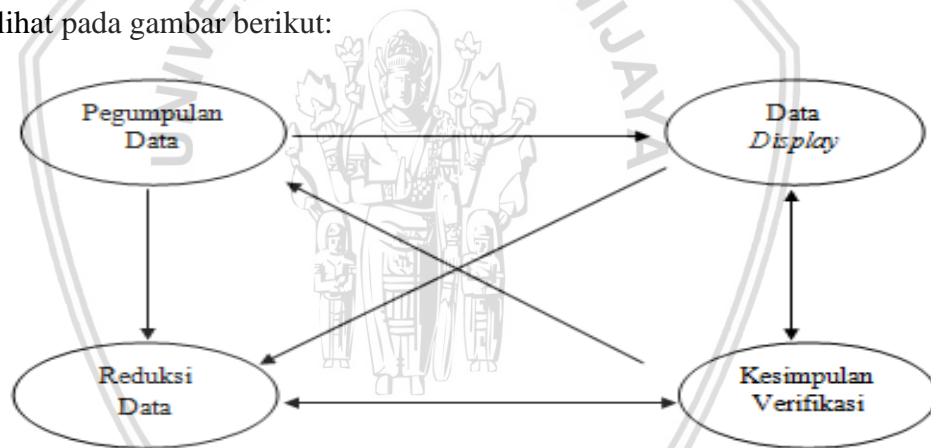
3. Perangkat Penunjang

Merupakan alat umum yang digunakan oleh peneliti yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis untuk menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dipikirkan dan dilihat dalam pengumpulan data di lapangan. Catatan yang diperoleh di lapangan digunakan untuk

mencatat informasi-informasi penting yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan metode interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman yang terdiri dari 3 kegiatan analisis data secara serempak yaitu: (1) reduksi data (data reduction); (2) data display (display data); dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Model analisis interaktif Miles & Huberman dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 : Komponensial Analisis Model Interaktif Miles & Huberman

Sumber: Yusuf (2014:408)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Mojokerto

1. Kondisi Geografis

Kota Mojokerto, adalah salah satu Kota terpenting di dalam menopang segala kegiatan Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 16,46 km², terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari, yang keseluruhannya mencakup 18 kelurahan. Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut. Sedangkan batas-batas wilayah administratif Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Sebagian besar pemanfaatan lahan di Kota Mojokerto didominasi oleh lahan terbangun sekitar 53%, meliputi: permukiman (7,28 km² atau 44,23%); industri (0,45 km² atau 2,71%); perkantoran (0,42 km² atau 2,52%); bangunan umum (0,07 km² atau 0,4%); serta fasilitas umum (0,32 km² atau 1,97%) yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan dan peribadatan. Sedangkan lahan tidak terbangun sekitar 47%, terdiri dari: sawah irigasi (6,39 km² atau 38,8%); perkebunan (1,20 km² atau 7,27%); serta ruang terbuka hijau (0,15 km² atau 0,89%) yang meliputi makam, lapangan olahraga dan taman.

2. Kondisi Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kota Mojokerto mengalami kenaikan yang relatif kecil. Pada tahun 2007 jumlah penduduk seluruhnya adalah 115.519 jiwa dengan komposisi 56.783 jiwa penduduk laki-laki dan 58.736 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2008 jumlah tersebut meningkat menjadi 116.355 jiwa dengan komposisi 57.243 jiwa penduduk laki-laki dan 59.112 penduduk perempuan. Sedangkan populasi penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2009 adalah sebesar 119.500 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 59.164 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 60.336 jiwa. Jumlah penduduk Kota Mojokerto dibandingkan dengan luas wilayahnya menunjukkan tingkat kepadatan penduduknya tinggi, yaitu 7.018 penduduk per kilometer persegi (km²) di tahun 2007; 7.069 jiwa/km² di tahun 2008; dan mencapai kepadatan 7.260 penduduk per km² di tahun 2009. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kota Mojokerto pada akhir tahun 2009 adalah sebesar 83.385 jiwa, atau 69,78% dari total penduduk. Penduduk usia non

produktif sebanyak 36.115 jiwa, atau 30,22% dari total penduduk, Sedangkan usia harapan hidup penduduk Kota Mojokerto adalah lebih dari usia 65 tahun. Data dan analisa menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non produktifnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia produktif di Kota Mojokerto memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi pembangunan.

Dalam Bab ke-4 ini akan dibahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto. Analisis dilakukan dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh dan diolah yang di dapatkan melalui wawancara dengan informan maupun informasi tertulis, baik data-data yang dimiliki oleh informan maupun tulisan di media massa.

3. Kondisi Ekonomi Kota Mojokerto

Kota Mojokerto memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ekonomi nasional maupun daerah sekitarnya hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi kota mojokerto yang sering lebih tinggi dari lajuh pertumbuhan ekonomi sekitar. Selain itu secara letak wilayah, mojokerto berdekatan dan merupakan daerah penyanggah atau pendukung kota surabaya atau dikenal dengan “*ring satu*” bersama dengan kabupaten sidoarjo, kabupaten gersik dan kabupaten mojokerto. Saat ini beragam sektor penggerak ekonomi, yang merupakan nadi perekonomian kota ini meliputi sektor industri, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa, telah tumbuh

pesat dikota Mojokerto. Khusus untuk sektor perdagangan dan jasa perkembangannya sangat cepat mengingat kota Mojokerto berusaha menjadikan dirinya sebagai kota pelayanan yang lebih mengutamakan sektor perdagangan dan jasa dengan pertimbangan luas wilayah yang cukup kecil.

Masalah pengangguran merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi banyak daerah di Indonesia termasuk kota Mojokerto. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja atau tidak mempunyai pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada sehingga mengakibatkan sejumlah tenaga kerja tidak diberdayakan dalam perekonomian tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017-2022 diperkirakan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 diperkirakan tingkat pengangguran terbuka kota Mojokerto sebesar 3,67 % dengan jumlah pengangguran sebesar 2.578 orang diperkirakan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2,05 % dengan jumlah pengangguran sebanyak 1.532 orang. (Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Permasalahan Pengangguran tersebut dikarenakan kurangnya tempat kerja yang disediakan Permasalahan ketenagakerjaan di kota Mojokerto merupakan masalah yang kompleks dan sangat luas keterkaitannya dengan masalah – masalah lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menghadapi permasalahan tersebut diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang komprehensif dengan direncanakan secara sistematis dan efektif. Dengan demikian perencanaan tenaga kerja harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan secara menyeluruh, yang melibatkan berbagai

bidang yang terkait. Semua kebijakan, strategi dan program dalam perencanaan ketenagakerjaan baru bermanfaat atau menjadi kenyataan apabila hal tersebut telah menjadi komitmen dan semua *stakeholder* untuk mengimplementasikan dan melaksanakannya. Dengan demikian perlu ditumbuhkan pula komitmen dan peran serta yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait dalam pengimplementasiannya.

Secara umum beberapa masalah pokok ketenagakerjaan di Kota Mojokerto antara lain sebagai berikut:

- 1) Lapangan kerja yang terbatas sehingga tidak seimbang antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja yang ada. Dengan demikian tidak mampu menyerap semua angkatan kerja yang ada di kota Mojokerto.
- 2) Pencari kerja yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan/lapangan pekerjaan jumlahnya masih sangat sedikit
- 3) Kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia pada penduduk usia kerja yang mempunyai pendidikan maksimum lulus SD masih sebesar 61,04% pada tahun 2015 (*data BPS*)
- 4) Mayoritas masyarakat cenderung menginginkan bekerja sebagai pegawai (buruh/karyawan), hal tersebut mengakibatkan sedikitnya angkatan kerja yang mau menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwira usaha
- 5) Perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja masih dirasakan belum optimal, sehingga penegakan hukum perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang mengacu pada kondisi ketengakerjaan yang ada dan target capaian kearah yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. Gambaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

1. Visi dan Misi

a. VISI

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto, maka Visi yang akan dicapai dalam pengembangan Industri dan Perdagangan adalah :

” Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang modern, Berdaya Saing dan Mandiri ”

Industri yang Modern : Kemampuan menggunakan teknologi yang mampu membuat produk berkualitas. Industri yang Berdaya saing : Kemampuan bertahan dan berdaya saing serta menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan berkembang cepat. Industri yang Mandiri : Kemampuan untuk mengembangkan usaha dengan kekuatan sendiri yang dilandasi dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan profesional dengan memanfaatkan peluang dan fasilitas pengembangan usaha yang tersedia. Perdagangan yang Modern : Kemampuan pengelolaan Perdagangan yang dikelola

secara profesional dengan menggunakan teknologi informasi. Perdagangan yang Berdaya saing : Kemampuan didalam memberikan pelayanan konsumen dengan nyaman, bersih, tepat waktu, berkualitas, harga yang terjangkau. Perdagangan Mandiri : Kemampuan mengembangkan usaha perdagangan dalam negeri, usaha ekspor terhadap produk dalam negeri dan mengendalikan produk-produk impor.

b. MISI:

Sesuai dengan visi diatas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto mempunyai misi :

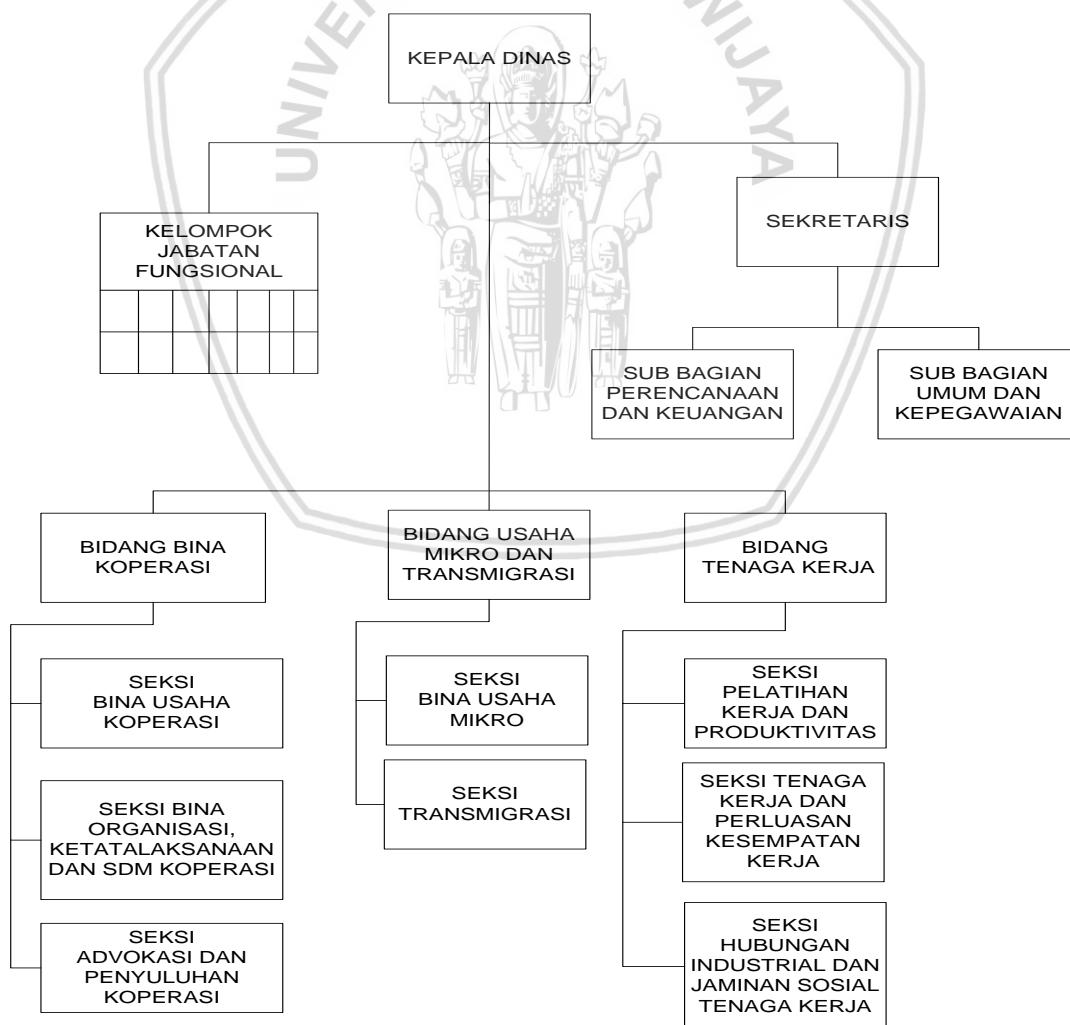
1. Mewujudkan klaster industri untuk penguatan ekonomi kota Mojokerto
2. Mewujudkan industri yang mampu mengakses teknologi dan mempunyai daya saing
3. Mewujudkan perdagangan yang mampu menyerap hasil industri yang menguasai pangsa pasar dalam dan luar negeri

c. Fungsi Dinas Perdagangan

1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang Perdagangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perdagangan mempunyai tugas
 - a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan
 - b. Memverifikasi rekomendasi Penerbitan izin, pendaftaran perusahaan usaha perdagangan;
 - c. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
 - d. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- e. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- f. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
- g. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan;
- h. Penyelenggaraan perdagangan antar pulau (misi dagang)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto



C. Gambaran Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau kedaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah perjalanan sehingga suatu instansi dapat tetap berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, serta produktif dan senantiasa inovatif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto sebagai mana Renstra yang telah ditetapkan pada Tahun 2014.

a. Visi Satuan Polisi Pamong Praja (2014-2018) adalah :

“Terciptanya Suatu Tatanan Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Teratur melalui Penerapan Sistem Penegakan Hukum yang Partisipatif”

Penjelasan dari visi diatas, adalah sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin

c. Penegakan hukum yang partisipatif mengandung makna bahwa terdapat kesadaran hukum yang berdampak pada semakin menurunnya angka pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah, yang pada akhirnya bermuara pada sistem pemerintahan yang terbuka, bersih dan akuntabel serta senantiasa mendapat legitimasi dan dukungan penuh dari publik.

b. Misi

Dalam mewujudkan Visi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan.

Misi pada Renstra dirumuskan dalam poin pernyataan sebagai berikut:

“Mengamankan Kebijakan Pemerintahan Daerah melalui Peningkatan Profesionalisme Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang Mampu Mendorong Derajat Kesadaran Hukum Masyarakat”

1. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis

yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sehubungan dengan itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Meningkatnya pelayanan perlindungan masyarakat

E. Penyajian Data

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto Berdasarkan Model Implementasi George C. Edward III

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Keberadaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima (PKL) ini sering menimbulkan masalah tersendiri. Yang menjadi persoalan di banyak daerah bahwa sektor informal khususnya pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto yang berada di area tengah kota serta menempati trotoar yang biasanya digunakan oleh pejalan kaki dengan alasan mudah dijangkau oleh pembeli. Hal ini

menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di kota serta terganggunya kebersihan, ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan bagi masyarakat kota, dan keindahan kota, salah satunya adalah di Kota Mojokerto. Untuk menindak lanjuti hal ini maka Pemerintah Kota Mojokerto membuat Kebijakan berupa Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

Kebijakan Peraturan Daerah kota Mojokerto No 5 Tahun 2005 merupakan peraturan yang mengatur Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto. Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh suatu daerah sebagai sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Abdullah, 2005:131). Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 merupakan dasar bagi Pemerintah dalam melakukan penataan ketentuan kegiatan usaha pedagang kaki lima, penggunaan tempat, waktu berjualan. Arah kebijakan penataan pedagang kaki lima yang didasarkan pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keindahan, kemanan, ketentraman, kebersihan di wilayah Kota Mojokerto. Selain itu keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat mengurangi tingkat pengangguran. Berikut adalah salah satu isi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Kota Mojokerto:

PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA

KETENTUAN KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, Kebersihan di Wilayah Kota Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar dan di atas saluran umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk kegiatan pedagang kaki lima atau yang sejenis ;
- (3) Walikota dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, trotoar dan saluran umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban Kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan keadaan pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang dapat menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, Kebersihan dan keindahan serta menjaga kesehatan lingkungan disekitar tempat kegiatan usahanya
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut akan ditetapkan oleh Walikota

BAB II

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

PASAL 4

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Walikota memberikan pembinaan melalui unit teknis yang membidangnya berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin marak merupakan

persoalan pelik bagi hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk di Mojokerto. Hal ini dikarenakan mereka biasanya melakukan aktivitas di tempat-tempat publik seperti trotoar, taman, tepi jalan, tanah kosong, jalan umum dan tempat lainnya yang bukan hak miliknya. Akibatnya, banyak ruang publik yang

berubah fungsi. Apalagi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut menimbulkan kekumuhan, kesemrawutan dan mengganggu lalu lintas.



Gambar 4.2 Keadaan lalu lintas kota Mojokerto
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar berada di sekitar alun-alun Kota Mojokerto menimbulkan beberapa permasalahan khususnya terkait kebersihan dan keindahan kota. Seringkali pedagang kaki lima (PKL) tersebut kurang memperhatikan kebersihan tempat berjualannya sehingga banyak sampah berserakan di sejumlah wilayah. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat merasa terganggu. Pemerintah telah memberikan peringatan tetapi para pedagang kaki lima (PKL) tetap saja membangkang dan tidak memperdulikan. Berikut adalah data yang menyebutkan adanya pelanggaran yang masih dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL).

Tabel 4.1 Berikut dalah data keseluruhan Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto yang masih berjualan ditempat yang sudah dilarang pada Tahun 2016 dan 2017:

No	Nama tempat	Tahun		Aktivitas
		2016	2017	
1	Majapahit	61	13	Badan jalan
2	Alun-alun	70	8	Badan jalan
3	Residen Pamuji	94	28	Badan jalan
4	Pb. Sudirman	41	7	Badan jalan
5	Ahmad yani	11	1	Badan jalan
6	Cokroaminoto	35	8	Badan jalan
7	Benteng pancasila	42	32	Badan jalan
8	Surodinawan	8	1	Badan jalan
9	Wakhid hasyim	7	5	Badan jalan
10	Yas Sudarso	10	-	Badan jalan
11	Jl. Suprpto	-	6	Badan jalan
11	Jl. Taman siswa	-	5	Badan jalan
11	Raden wijaya	-	1	Badan jalan
11	Gajah mada	-	1	Badan jalan
11	Mayjen sungkono	-	3	Badan jalan
11	Jl. Letkol sumarto	-	1	Badan jalan
Jumlah		379	120	

Sumber : Diolah oleh penulis dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

Pemerintah Mojokerto telah membahas permasalahan ini. Upaya relokasi menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tempat relokasi bagi pedagang kaki lima (PKL) ini sering dianggap sulit dijangkau oleh pembeli sehingga menjadikan pedagang kaki lima (PKL) enggan untuk menempatnya. Pemerintah kota mojokerto dari tahun 2010 telah membuat wacana tentang relokasi para pedagang kaki lima (PKL), dan pada 2011 wacana ini dapat dilaksanakan. Relokasi ini didasari dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/580/ 417.111 / 2012 yang telah

dipebarui menjadi Keputusan Walikota Mojokerto nomor 188.45/433/417.111/2016 tentang penetapan jumlah/data pedagang, jenis barang yang diperdagangkan dan lokasi lapak pada pusat perdagangan kaki lima (PPKL) di Kota Mojokerto. Namun terjadi kesulitan karena para pedagang kaki lima (PKL) tidak mau dilakukan relokasi tempat dagangannya. Sejumlah aksi mereka gelar, mulai pengumpulan tanda tangan yang menyatakan penolakan penggusuran hingga melakukan aksi di depan gedung pemerintahan Walikota Mojokerto. Namun pihak pemerintah terus berupaya dalam melaksanakan kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di alun-alun dan joko sambang.



Gambar 4.3 Aksi protes PKL Kota Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kota Mojokerto

Untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana kebijakan itu berhasil diterapkan atau tidak, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III. Analisis ini telah menetapkan empat syarat (*variabel penting*) untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti akan menjelaskan masing-masing variabel tersebut

dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 5 tahun 2005 Tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Komunikasi merupakan proses terjadinya penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Informasi kebijakan harus disampaikan kepada subyek kebijakan, agar subyek kebijakan dapat mengetahui isi kebijakan dan apa yang harus dikerjakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti memasukkan tiga indikator yang terdapat dalam variabel komunikasi, yaitu:

1. Tranmisi

Komunikasi sangatlah penting bagi jalannya proses penataan pedagang kaki lima (PKL), terutama dalam mengimplementasikan tata cara pembinaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Dalam Peraturan Daerah No 5 tahun 2005 Kota Mojokerto menjelaskan tentang bagaimana penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 5 Tahun 2005 bahwasannya pedagang kaki lima (PKL) adalah satu segi kehidupan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu untuk diadakan penataan dan pembinaan demi kemajuan usahanya dan diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan Kota yang bersih, sehat, rapi dan indah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan

oleh Bapak Hatta selaku Kepala Sub bagian perencanaan di Satuan Polisi Pamong praja Kota Mojokerto, berikut penuturannya:

“Tujuan Walikota Mojokerto membuat Kebijakan tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) itu untuk menciptakan Kota Mojokerto menjadi Kota yang bersih, indah dan nyaman. Kota Mojokerto itu bisa dibilang kota kuliner ya mbak, banyak banget pedagang kaki lima (PKL) itu tempat jualannya ngawur. Misalkan aja di alun-alun yang harusnya steril dari penjualan, lalu di trotoar”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 februari 2018).



Gambar 4.4 Kondisi di dalam **Gambar 4.5 Kondisi pada luar alun**
 Sumber: Dokumentasi penulis, 2018 Sumber: Dokumentasi penulis, 2018
 Implementasi akan berjalan efektif jika keputusan kebijakan dan

perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Komunikasi kebijakan penanganan Pedagang kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto terjadi ketika suatu produk hukum/kebijakan yang telah disahkan oleh Walikota, dengan sendirinya terkomunikasikan kepada dinas-dinas yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan kebijakan, dinas-dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

Koordinasi yang baik memerlukan komunikasi yang baik, utamanya agar tidak terjadi kesalah pahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi pelaksanaan kebijakan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat diilustrasikan secara lebih jelas dengan bagan alur komunikasi pelaksanaan kebijakan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa alur tersebut sudah berjalan. Salah satunya adalah Perda no 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah diberlakukan. Komunikasi dilakukan dalam rangka koordinasi penertiban. Upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) ilegal dilakukan dengan menggunakan prosedur pemberian surat peringatan dan juga memberikan sosialisasi bahwa ada kebijakan ini. Apabila semua itu tidak diindahkan, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut masih bersikeras untuk tetap berjualan di tempat yang bukan semestinya maka akan dilakukan pengusuran dan penertiban secara paksa oleh Satpol PP Kota Mojokerto.

Dalam upaya mengimplementasi kebijakan yang optimal, pelaksana kebijakan perlu melakukan komunikasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pihak yang dikenai langsung untuk kebijakan penanganan ini. Komunikasi kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang berbentuk dialog, yang didalamnya terdapat banyak negosiasi yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebanyakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengetahui secara pasti bagaimana kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini. mereka menuntut untuk dilegalkan berjualan di sekitar alun-alun. Demo dilakukan pada tanggal 22 juni 2015 di depan kantor Pemerintah Kota Mojokerto atau tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 15, Balongsari, Magersari, Kota Mojokerto.

Alasan demonstrasi ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) menganggap bahwa peraturan Daerah Kota Mojokerto yang melarang para Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di area sekitar alun-alun, para Pedagang Kaki Lima (PKL) menganggap bahwa kebijakan itu sangat merugikan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan hanya menguntungkan bagi Pemerintah saja. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dianggap sebagai tindakan yang menyudutkan Pedagang Kaki Lima (PKL).



Gambar 4.6 Aksi Protes PKL Alun-alun Mojokerto
Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kota Mojokerto

Setelah melakukan aksi protes Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan upaya lain untuk melawan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Para Pedagang kaki lima (PKL) melakukan upaya perundingan dengan pihak-pihak yang terkait didalamnya, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Berdasarkan pemaparan salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang juga aktif dalam setiap langkah yang ditempuh dalam merespon Peraturan Daerah, perundingan dilakukan untuk meminta izin resmi dari pihak

Pemerintah Kota Mojokerto. Berikut pemaparan Kusnan pedagang soto ayam mengenai perundingan yang telah dilakukan:

“Ya, Saat itu saya ikut serta dalam perundingan itu mbak, rundingannya ya gitu masalah izin untuk bisa jualan di alun-alun. Soalnya alun-alunnya kan mau direnovasi. Jualannya sekarang disuruh diluar alun-alun tapi itu kalo diizinkan. Kita berunding itu agar larangan jualan di alun-alun itu hanya berlaku untuk jualan didalamnya saja bukan diluarnya. Kan kalau kita berjualan di luar alun-alun kan sudah jelas tidak akan merusak keindahan yang sudah ditata.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Maret 2018).



Gambar 4.7 Kondisi saat dilakukan perundingan

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Pemaparan tersebut diperkuat oleh pemaparan dari sesama Pedagang Kaki Lima (PKL) lain yang ikut serta dalam negosiasi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan perwakilan dari pihak Pemerintah Kota Mojokerto yang mengeluarkan kebijakan mengenai relokasi dan sterilisasi. Berikut wawancara dengan Sutrisno pedagang VCD:

“Saya memang ikut mbak dalam rundingan negosiasi biar tetep bisa jualan di Alun-alun, Waktu itu saya ingat sekali pas puasa ramadhan. Kami ikut dalam rundingan itu karena kami ingin tetap dibolehkan berjualan diluar alun-alun. Kami sampaikan langsung keinginan kami kepada wakil dari Walikota Mojokerto saat itu. Dengan ikut perundingan itu supaya diperbolehkan untuk jualan diluar alun-alun. Eh ternyata tetap aja mbak gak boleh.” (Hasil wawancara tanggal 6 maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan negosiasi atau perundingan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Mojokerto. Keinginan pedagang kaki lima (PKL) adalah berjualan di luar area alun-alun atau jalan raya yang dirasa tidak akan mengganggu keindahan alun-alun yang telah ditata dengan rapi. Keinginan tersebut telah di terima oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Berikut pemaparan dari pihak Pemerintah Kota Mojokerto, yaitu Ibu Retno selaku staf dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto khusus di bidang Perdagangan.

“Mengenai perundingan saat itu kita dari beberapa pihak yang terlibat memang mengajak para Pedagang Kaki Lima(PKL) yang berada di alun-alun dan jalan joko sambang untuk berunding. Karena kami ingin mengetahui apa yang mereka inginkan, tanpa adanya tindakan kerusuhan. Ada 182 PKL yang ikut serta dalam sosialisasi yang kita lakukan. Tetapi jumlah PKL yang ikut dalam sosialisasi tidak semuanya hadir, karena sebenarnya yang kita undang ada 242 PKL yang berasal dari alun-alun dan joko sambang. Saat itu kami bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Seperti Dinas Sosial sebagai dinas yang bertugas dalam hal kesejahteraan rakyat dan juga melindungi serta mengayomi masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pihak yang bertugas untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima. Setelah semua Dinas terkumpul kami mengkaji kembali keinginan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Lalu kita laporkan ke Walikota Mojokerto yang menjabat dulu masi H.Abdul Gani Suhartono. Tetapi tetap beliau tidak mengizinkan karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan isi Perda yang telah dibuat, Karena didalam Perda no 5 tahun 2005 kan sudah dijelaskan mbak bahwa salah satu isi dari perda tersebut adalah “Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, kebersihan di wilayah Kota Mojokerto. Karena menurut Bapak Abdul Gani kalau kita mengizinkan mereka untuk brjualan di alun-alun meskipun itu diluar alun-alun tetap saja mengganggu keindahan Kota. Oleh karena itu keputusan yang diambil adalah tetap tidak memberikan ijin terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL)”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 febuari 2018).

Pemaparan tersebut diperkuat lagi dengan penjelasan dari Bapak Hariono selaku ketua dari bidang perdagangan, berikut adalah pemaparannya:

“ Dengan ditetapkannya keputusan Walikota itu mbak, kami selaku Dinas yang terkait mengumpulkan kembali para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di alun-alun dan jalan Joko Sambang untuk memberikan sosialisasi terkait dengan masalah ini. Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto berusaha memberikan pengertian terhadap para Pedagang Kaki Lima(PKL) untuk bisa menerima adanya penertiban ini. Pihak dari kita juga selalu memberikan pembinaan terhadap pedagang Kaki Lima (PKL). Tapi dalam hal ini banyak sekali Pro dan Kontra, ada masyarakat yang bisa menerimanya, tetapi lebih banyak yang menolaknya. Mereka menganggap bahwa dengan diberlakukannya kebijakan ini maka mereka harus beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar. Mereka banyak yang beranggapan bahwa lokasi yang telah ditentukan untuk relokasi itu tidak seramai tempat yang mereka tempati terdahulu. Mereka takut penghasilan yang biasa mereka dapatkan tidak sebanding dengan pendapatan yang akan diperoleh di tempat yang baru. Tetapi kita berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa ditempat yang baru lokasinya juga sangat strategis, karena tempat itu adalah didesain menjadi pusat tempat pembelanjaan. Pada akhirnya mau tidak mau ya mereka harus tetap mentaati peraturan yang telah ditetapkan, yaitu dengan jalan relokasi. Tempat relokasi yang dipilih adalah JL. Benteng Pancasila yang didasari dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 dalam penetapan pusat perdagangan kaki lima pasal 3”.(Hasil wawancara pada tanggal 20 februari 2018).



Gambar 4.8 Jalan Benteng Pancasila
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Wawancara tersebut diperkuat lagi dengan pemaparan dari Ibu Siti.

Berikut pemaparannya:

“Setelah kita mengumpulkan semua para Pedagang Kaki Lima, kita dari disperindag selalu memberikan pembinaan yaitu berupa sosialisasi. Kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa perda yang dibuat itu harus

ditaati dan jika di langgar maka akan ada sanksi sendiri. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kebijakan untuk menjadikan ruang-ruang publik berfungsi sebagaimana mestinya seperti trotoar, badan jalan, dan taman kota. Kebijakan tersebut diambil didasari oleh peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pusat Perdagangan Kaki Lima (PPKL) di Kota Mojokerto. Dan juga perda yang diatur dalam sumber hukum berupa peraturan daerah nomor 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima (PKL)". (Hasil wawancara tanggal 20 februari 2018).

Berikut salah satu isi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pusat Perdagangan Kaki Lima (PPKL) Kota Mojokerto:

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Pusat Perdagangan Kaki Lima bertujuan untuk:

- a. Menciptakan kawasan usaha baru sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para pedagang kecil dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- b. Mengembalikan fungsi jalan dan prasarana lingkungan kota
- c. Mewujudkan ketertiban dan keindahan kota
- d. Menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisno pedagang VCD, mereka mengatakan kalau para Pedagang Kaki Lima (PKL) diperbolehkan berjualan di ujung gang, namun untuk yang berjualan disisi utara, timur, selatan, maupun barat alun-alun itu tidak diperbolehkan. Berikut penuturannya:

“Sebenarnya ya gak boleh mbak jualan disini (sisi alun-alun). Kalau ada razia Satpol PP ya selalu kena, katanya sih melanggar Perda gitu. Tapi aku itu gak ngerti mbak apa isi perdanya itu, cuman kalau pas razia itu dikasih tau kalau melanggar Perda. Kalau diujung gang gitu boleh mbak, tapi kan ya harus berebutan sama pedagang lain. Barangku ya sudah banyak yang disita sama Satpol PP mbak. Kalau mereka nyita barangku ya diam saja mbak orang aku ya memang nakal udah gak taatin peraturan, ya mau

gimana lagi mbak, pasrah saja.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Maret 2018).

Berdasarkan petikan wawancara diatas, Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Hatta selaku Kepala Sub bagian perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Penulis menggali informasi perihal Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di alun-alun Kota Mojokerto. Berikut pernyataannya:

“Gini mbak, kita itu sudah selalu memberikan pengertian terhadap para pedagang kaki lima (PKL) untuk bisa menerima adanya penertiban ini. Banyak sekali yang tidak bisa menerima kebijakan relokasi ini. Kalau masalah pedagang yang di alun-alun itu sudah ada tempat yang disediakan oleh Walikota mbak, yaitu di Jalan benteng pancasila. Pas waktu kita menertibkan saya dan anggota Satpol PP yang lainnya itu mengacu pada Perda no 3 tahun 2013 pasal 26, tentang ketertiban umum pada bagian tertib Pedagang Kaki Lima (PKL). Jadi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih tetap saja berjualan disana ya jelas itu sudah melanggar perda”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2018).

Pasal 26

Pedagang kaki lima dilarang melakukan hal-hal berikut:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Walikota
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya

2. Kejelasan

Kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh Permenitah Kota Mojokerto terhadap para pedagang kaki lima (PKL) adalah berupa ketentuan kegiatan usaha, pembinaan, penggunaan tempat, dan ketentuan pidana. Kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) telah dijelaskan bagaimana melaksanakannya telah diatur dan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005. Isi peraturan mengenai syarat-syarat mengimplementasikan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan kegiatan usaha pedagang kaki lima (PKL)

Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengeluarkan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) ini salah satunya yaitu untuk menjaga keteriban dan keindahan, keamanan, ketentraman, kebersihan di wilayah Kota Mojokerto. Oleh karena itu Pemerintah melarang para pedagang kaki lima (PKL) untuk menggunakan tempat-tempat umum. Misalnya di trotoar dan diatas saluran umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) karena hal ini dapat menimbulkan kerusakan., kesemrawutan. Untuk selanjutnya tempat yang dilarang keras adalah kawasan tertib lalu lintas. Hal ini dibenarkan dengan pernyataan dari Bapak Hatta selaku Kepala Sub bagian Perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut adalah penuturannya:

”Para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto tidak boleh menempati tempat yang sudah dilarang mbak. Misalkan di alun-alun, trotoar, lalu kawasan tertib lalu lintas. Karena jika PKL tetap

berjualan disitu Kota Mojokerto gak akan pernah bisa bersih. Mangkanya kita dari Satpol PP benar-benar tegas untuk menertibkan mereka. Kalaupun mereka masih bersikeras untuk memakai tempat umum mereka harus mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan jenis barang yang diperdagangkan. Tapi terkadang pihak kita mau kasar gitu gak tega mbak, kasihan”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 februari 2018)”.



Gambar 4.9 PKL yang masih bandel berjualan ditempat terlarang

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

2) Pembinaan pedagang kaki lima (PKL)

Walikota Kota Mojokerto memberikan pembinaan melalui unit teknis yang membidangnya berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan guna untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima (PKL). Cara yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto adalah dengan cara Sosialisasi. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Retno selaku staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Berikut adalah pemaparannya:

“Walikota menugaskan kepada kita (Disperindag) untuk membina para pedagang kaki lima. Dalam arti disini kita ditugaskan sebagai Dinas yang memberikan bimbingan berupa penyuluhan yaitu sosialisasi. Disini Walikota mengeluarkan Perda ya mbak,

Perdanya disitu tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Jalan yang diambil pemerintah Mojokerto itu sendiri adalah dengan diadakannya relokasi pedagang kaki lima (PKL). Untuk saat ini yang sudah dilakukan adalah relokasi pedagang alun-alun dan jalan joko sambang Kota Mojokerto. Lah dengan adanya keputusan itu kita adakan sosialisasi untuk memberikan pengertian kepada para pedagang kaki lima (PKL) agar tidak terjadi kesalah pahaman.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 februari 2018).

3) Penggunaan Tempat

Setiap pedagang kaki lima (PKL) yang akan menggunakan tempat berjualan seperti jalan umum, trotoar, kawasan tertib lalu lintas haruslah mengajukan permohonan atau melakukan izin terlebih dahulu,. Persyaratannya adalah sebagai berikut diatur dalam Peraturan Daerah No 19 Tahun 2012:

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 wajib memiliki izin penempatan PPKL dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
 - a. Photo Copy Kartu anda Penduduk (KTP)
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi PPKL dan fasilitas umumdi sekitarnya
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum
- (3) Izin Penempatan PPKL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali

- (4) Izin Penempatan PPKL tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pejabat yang berwenang

Syarat yang sudah dijelaskan diatas dibenarkan oleh pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja, berikut adalah penuturan bapak Hatta selaku Kepala sub bagian perencanaan:

“Untuk para PKL yang bersih keras untuk menempati tempat yang sudah dilarang itu harus izin dulu itu benar. Kita ada beberapa syarat ketentuan yang harus ditaati yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Disini para PKL yang dijalan itu kan juga termasuk sebagai pusat perbelanjaan. Jadi ya kita kasih tau kalau mereka bisa menempati tempat itu dengan syarat harus mematuhi peraturan yang dibuat. Yaitu harus izin dulu, syarat izin sudah tercantum di peraturan walikota no 19 tahun 2012 pusat perdagangan kaki lima (PPKL) di kota mojokerto. Tapi ya gitu mbak para PKL ga ada yang mau ngurus izin itu, mereka tetap aja berjualan tanpa izin. Ya akhirnya mau gak mau kita harus adakan razia paksa ke mereka”. (Hasil wawancara pada tanggal 4 februari 2018).

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan bapak Sutejo selaku staff

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto :

”Setiap pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan tempat harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Lalu untuk selanjutnya jika sudah mendapatkan izin tempat yang sudah diizinkan tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun tanpa persetujuan dari Walikota, dan pemberian izin tempat bisa dicabut jika pemegang izin melanggar ketentuan syarat yang telah ditetapkan, tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat bagi kegiatan pedagang kaki lima dan pemerintah juga tidak akan memberi ganti rugi.” (Wawancara pada tanggal 4 februari 2018).

3. Konsistensi

Konsistensi informasi sangat diperlukan dalam pengaturan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

Konsistensi perlu dilakukan dalam melakukan komunikasi dalam

mengukur tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hal yang menyangkut konsistensi komunikasi adalah bagaimana para pelaksana kebijakan mampu untuk selalu menjaga eksistensinya, dan juga untuk tetap menjaga komunikasi pelaksanaan tersampainya dari tingkatan pelaksana yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada pihak Dinas yang terkait mereka mengatakan sudah sangat jelas apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban setiap pelaksana kebijakan yang ikut serta dalam menjalankan implementasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Berikut penjelasan dari Bapak Sudibjo dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto selaku Kepala Bidang Perdagangan Kota Mojokerto:

“Kami selalu mensosialisasikan kebijakan pemerintah terhadap para PKL, kita mengumpulkan para pedagang kaki lima (PKL) untuk berembug bersama, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Untuk yang kita undang sosialisasi ya semua PKL khususnya yang wajib datang itu ketua paguyuban para pedagang kaki lima (PKL) masing-masing”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 februari 2018)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Musliman selaku Ketua paguyuban

Pedagang kaki lima:

“Saya selalu diundang di balai pertemuan Satpol PP dan Disperindag untuk diadakannya sosialisasi. Ya disana saya diberi tahu bahwa ada Perda terbaru yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Saya dan teman-teman diberi tahu isi perdanya bahwa tidak diperbolehkan PKL untuk berjualan ditempat umum. Lah pada saat itu kita para PKL ya bersih keras mbak untuk mempertahankan lapak kita, soalnya kan mata pencaharian kita dari situ. Kalau lapak kita digusur anak istri makan apa. Tapi ternyata pemerintah ada solusi untuk merelokasi, kita dipindahkan di jalan benteng pancasila. Ya

kita tetap nolak soalnya kan tempatnya gak sama kayak jualan ditempat biasa yang selalu ramai”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018).



Gambar 4.10 wawancara dengan ketua paguyuban PKL Mojokerto

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Ketua Satpol PP Bapak Nurjati selaku Kepala Bidang Penertiban:

“Kita bekerjasama dengan Disperindag mbak buat ngadain sosialisasi sama para pedagang kaki lima. Soalnya kan Disperindag yang memiliki wewenang untuk mengatur, membina jalannya relokasi ini. Kalau kita dari Satpol PP kan hanya untuk penertiban dan keamanannya saja. Kita sama Disperindag terus menerus memberikan sosialisasi, memberikan pengertian terhadap para PKL agar mereka dapat menerima keputusan walikota mengenai relokasi itu mbak”. (Hasil wawancara pada 4 februari 2018).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dinas satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah melaksanakan dengan baik yang mana dalam penyaluran komunikasi diberikan wewenang oleh Walikota untuk melaksanakan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) Kota Mojokerto. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan dengan

cara penentuan kegiatan usaha, pembinaan, dan penggunaan tempat untuk para pedagang kaki lima (PKL). Penataan dan pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara merelokasi ke tempat yang baru dan memberikan sosialisasi agar mereka dapat memahami kebijakan yang telah dibuat oleh Walikota Kota Mojokerto.

b. Sumber Daya

Sumber Daya (*Resources*) adalah variabel kedua dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut model George C. Edward III. Sebagaimana diungkapkan oleh Edward apabila para pelaksana (*implementors*) kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan menjadi efektif, walaupun perintah implementasi ditranmisikan dengan akurat, jelas, dan konsisten. Ketersediaan sumber sangat penting karena keterbatasan akan sumber-sumber yang tersedia, baik tenaga, biaya, dan waktu, serta perumusan kebijakan yang hanya berdasarkan salah satu dari sejumlah kecil sumber-sumber tersebut dan membiarkan masyarakat merespon dengan caranya sendiri-sendiri, maka kebijakan publik yang dibuat tidak memperoleh dampak sebagaimana yang diharapkan. Sumber-sumber yang mendukung pelaksanaan kebijakan adalah staf, informasi, fasilitas, dan wewenang.

1) Sumber Daya Manusia (SDM) atau Staf

Staf adalah indikator pertama dalam variabel sumber daya untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi. Untuk mendukung suatu

implementasi perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) atau Staf yang memadai. Sumber daya yang dimaksud adalah staf dalam bidang yang ditanganinya harus sesuai dengan ketepatan dan kelayakannya yang disesuaikan dengan keahlian khusus yang dimiliki oleh staf tersebut. Selain ketepatan keahlian yang juga perlu dimiliki adalah adanya ketepatan jumlah staf. Jumlah staf yang dimiliki tidak boleh terlalu banyak karena jika terlalu banyak jumlah staf maka akan mengakibatkan borosnya pengeluaran Negara, akan tetapi juga tidak terlalu sedikit karena jika jumlah staf terlalu sedikit maka akan semakin lambat pergerakan suatu pemerintahan. Maka idealnya, diperlukan jumlah staff yang cukup yaitu tidak lebih dan tidak kurang. Berikut adalah jumlah staf untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) Kota Mojokerto:

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Tahun 2017:

No	Bidang	Staf
1	Bagian perencanaan dan keuangan	7
2	Bagian umum dan kepegawaian	8
3	Ketentraman dan ketertiban	9
4	Penyidikan dan penindakan	9
5	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	8
6	Pengamanan	10
7	Perlindungan masyarakat	7
8	Kesiapsiagaan dan peningkatan sumber daya	6
9	Operasional perlindungan masyarakat	15
	Jumlah	84

Sumber: Olahan peneliti 2018

Tabel 4.3 Data Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto 2017:

No	Bidang	Staf
1	Bagian perencanaan dan keuangan	3
2	Bagian umum dan kepercayaan	3
3	Bidang perindustrian	7

4	Pembinaan industri aneka	5
5	Pembinaan industri non aneka	5
6	Sesi Informasi	4
7	Bidang perdagangan	7
8	Seksi bina usaha	3
9	Seksi distribusi	3
10	Seksi perlindungan konsumen	5
11	Bidang standarisasi dan promosi	4
12	Seksi standarisasi produk	4
13	Seksi promosi	5
	Jumlah	58

Sumber: Olahan Peneliti 2018

2) Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi merupakan salah satu variabel yang penting. Bentuk informasi yang diberikan para implementator penegakan Peraturan Daerah No 5 tahun 2005 dijabarkan melalui rapat koordinasi yang terlaksana dengan mempertimbangkan terciptanya tujuan peraturan itu dibuat dan mempertimbangkan kondisi lapangan tanpa mematikan pendapatan para pedagang kaki lima (PKL) serta berpihak pada kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah memutuskan untuk diadakannya relokasi kepada para pedagang kaki lima (PKL) Kota Mojokerto yang diinformasikan melalui pengumuman resmi serta diadakannya sosialisasi untuk penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL). Khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang berada di alun-alun dan joko sambang Kota Mojokerto. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sugiono selaku Kepala bidang ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja, beliau menyatakan:

“Dengan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto menjadikan pemerintah mengeluarkan Perda No 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) khususnya bagi

pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Alun-alun dan jalan joko sambang akan diadakann relokasi. Hal ini dilakukan karena masalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sudah dari lama, keberadaan mereka juga sebagian besar menguntungkan dan pasti ada juga ada yang dirugikan bagi masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018).

Berikut data pedagang kaki lima (PKL) yang berada di alun-alun dan joko sambang:

Tabel 4.4 Data Pedagang Kaki Lima Alun-alun dan Joko Sambang

No	Asal	Jumlah
1	Alun-alun	124
2	Joko Sambang	127
	Jumlah	251

Sumber : Olahan Peneliti 2018

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Mulyono selaku kepala seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban, beliau menyatakan:

“Iya mbak benar adanya kalau pemerintah akan melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) yanag berada di alun-alun dan joko sambang. PKL akan dipindahkan di Jalan Benteng Pancasila, dimana tempat itu akan dijadikan sebagai pusat pembelanjaan. Pertama yang kita lakukan ya melakukan sosialisasi kepada para PKL”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Darman (penjual accecoris), berikut pernyataannya:

“Pemerintah melakukan relokasi itu benar mbak, pertama kita dikumpulkan dulu untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Satpol PP sama Disperindag. Mereka memberi tahu bahwa ada kebijakan untuk diadaknnya relokasi, ya saat itu kami tidak terima mbak, kita demo, protes, dan apapun kita lakuin untuk dapat memepertahankan tempat biasa yang kita buat jualan. Tapi ya mau gak mau pemerintah tetap relokasi, ya akhirnya kita harus pindah. Kalu gak pindah barang kita disita mbak. Terus ngurus buat barang kita biar kembali itu ribet, banyak persyaratannya”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2018).

3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Indikator selanjutnya yang penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto adalah sarana dan prasana, dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka keberlangsungan implementasi otomatis akan berjalan dengan baik, sebaliknya apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka suatu penerapan tidak dapat berjalan dengan baik dan akan terhambat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sugiono selaku Kepala bidang ketentraman dan ketertiban Satpol PP Kota Mojokerto:

“Sarana dan prasarana untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) DI Kota Mojokerto pemerintah menyediakan seperti adanya mobil razia, mobil patroli, truk sampah”. (Hasil wawancara tanggal 10 februari 2018).

Tabel 4.5 Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Mobil Patroli	2 unit
2	Truk Sampah	15 unit
3	Mobil Razia	4 unit

Sumber : Data Olahan peneliti, 2018

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Mashudi selaku Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, beliau menyatakan:

“Untuk sarana prasarana pemerintah masih memberikan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sugiono. Lah disini kenapa kok mobil patroli itu cuman disediakan ada 2 saja? Hal ini dikarenakan kita kalau berpatroli itu tidak secara bersamaan mbak, jadi kita kalau berpatroli itu setiap 2 jam sekali, tapi itu bergantian. Selain itu untuk masalah relokasi sarana prasarana dengan jumlah yang diberika oleh pemerintah itu adalah lapak dan paving. Itu kita sesuaikan dengan jumlah PKL yang ada. Untuk lebih detailnya Disperindag yang menangani”. (Hasil wawancara 10 februari 2018).



Gambar 4.11 Mobil razia Satpol PP Kota Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Penulis 2018

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Retno selaku staf Disperindag yang menangani masalah perdagangan, berikut adalah penuturannya:

“Untuk masalah sarana prasarana mbak memang kita dari Disperindag yang menangani dari relokasi. Untuk lapaknya kita menyediakan lapak secara gratis yang berukuran 2.00 X 3.00 M dan 1.25 X 3.00 M. Untuk lapaknya yang dibiayai pihak pemerintah hanyalah berupa kerangka lapak saja mbak”.(Wawancara pada tanggal 12 Februari 2018).



Gambar 4.12 Kerangka lapak

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2018

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Tatik yang juga staf bagian perdagangan di Disperindag Kota Mojokerto, berikut adalah penuturannya:

“Sarana dan prasarana yang kita berikan ya benar apa kata ibu retno mbak. Untuk sarana prasarana sendiri kita menganut pada Keputusan Walikota Mojokerto Nomor:188.45/819/417.111/2012 tentang penetapan pedagang, jenis barang yang diperdagangkan, waktu berdagang dan lokasi pada pusat perdagangan kaki lima (PPKL) Kota Mojokerto dan Keputusan Walikota Nomor:188.45/133/417.111/2016 tentang penetapan jumlah atau data pedagang, jenis barang yang diperdagangkan dan lokasi lapak pada pusat perdagangan kaki lima di kota Mojokerto”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 februari 2018).

Tabel 4.6 Data Relokasi Pedagang Kaki Lima untuk Kios ukuran 2.00 x 3.00:

No	Jumlah Pedagang Kaki lima	Jenis dagangan
1	47	Warung dan jajanan/kuwe/rokok palen
2	19	Souvenir, accecoris, kelengkapan berpakaian
3	19	Pakaian dan bahan kain
4	4	Mainan untk anak-anak
5.	24	VCD dan Elektronik

Sumber : Olahan Peneliti 2018

Tabel 4.7 Data relokasi pedagang kaki lima untuk kios ukuran 1.25 x 3.00 M:

No	Jumlah pedagang	Jenis dagangan
1	45	Makanan/ jajanan/ makanan ringan
2	25	Accecoris/ perlengkapan berpakaian buku/poster
3	12	Pakaian dan bahan kain
4	15	Maianan untuk anak-anak
5	6	Elektronik/VCD
6	7	Rokok

Sumber: Olahan Peneliti 2018

4) Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan indikator keempat dalam sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan ini, adanya kejelasan dan keterbukaan tentang anggaran akan sangat baik dan tidak akan merugikan, baik pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk relokasi. Dalam hal anggran Pemerintah Kota Mojokerto tidak begitu terbuka. Hal

ini bisa dikatakan karena adanya statemen dari staf Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto sebagai berikut.

“Untuk masalah anggaran habisnya berapa untuk relokasi kita masih belum tau mbak, soalnya kita belum merinci untuk semua”. (Hasil wawancara pada tanggal 22 februari 2018).

Hal ini diperkuat dengan penuturan dari pedagang sandal Bapak Mutakin selaku sekretaris paguyuban pedagang kaki lima (PKL):

“Untuk anggaran yang disiapkan sama pemerintah untuk relokasi kita gak tau mbak, orang mereka gak ngasih tau kita”. (Hasil wawancara 22 Maret 2018)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang terdida sudah ada yang baik dan masih ada juga yang buruk. Dimulai dari sumber daya manusia (SDM) jumlah staf yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto sudah memadai. Dengan Jumlah staf yang telah memadai menjadikan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada sumber daya informasi sudah cukup baik dalam cara penyampaian sosialisasi pada para pedagang kaki lima (PKL), tetapi disisi lain ada juga pedagang kaki lima (PKL) yang masih saja berontak. Sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai, pemerintah telah menyiapkan lapak untuk ditempati para pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi. Untuk sumber daya anggaran pemerintah disini tidak dapat terbuka, akibatnya imlementasi kebijakan menjadi terhambat karena para pedagang kaki lima (PKL) menganggap bahwa para pelaksana kebijakan tidak mau terbuka masalah anggaran karena ingin menguntungkan pihak pelaksana kebijakan itu sendiri.

c. Disposisi

Edward III mengatakan bahwa sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian sebaliknya, bila perilaku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit. Disposisi merupakan keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang ada sehingga dijadikan sebagai suatu tujuan yang benar-benar ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, kecenderungan pelaksana kebijakan penanganan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah program-program kerja yang direncanakan dan direalisasikan, pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi, dan *feed back* masyarakat dan pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri. Hal-hal tersebut dapat merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka mengimplementasikan kebijakan. Kecenderungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dapat ditinjau dari penjelasan Bapak Sugiono selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban:

“Pada saat relokasi dijalankan kita dari Satpol PP dan juga Disperindag secara bersamaan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di alun-alun dan joko sambang. Sebelum kita melakukan penertiban itu sudah ada sosialisasi untuk memberitahu kepada mereka. Namun ya mereka masih banyak yang membandel, malah jumlah PKL nya makin banyak”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 februari 2018).



PKL saat ditertibkan oleh Satpol PP Kab. Mojokerto

Gambar 4.13 Penertiban PKL Kota Mojokerto

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Mulyono selaku Kepala bidang pembinaan dan ketentraman:

“Pada saat relokasi sudah mulai dijalankan mbak kita dari Satpol PP bekerja sama dengan Disperindag untuk bekerja sama, untuk masalah pembinaan itu tugasnya Disperindag, kalau kita (Satpol PP) tugasnya untuk menertibkan. Pada saat relokasi dimulai itu ya masih banyak sekali PKL yang masih berjualan disitu mbak. Setiap penertiban kita selalu memberi peringatan kepada para PKL mbak, lalu kita kasih waktu mereka untuk membereskan dagangannya. Kadang kita juga ikut serta membantu mereka, tapi ya masih ada mbak kadang-kadang PKL yang membangkang. Kalau untuk PKL yang masih bandel ya terpaksa kita angkut secara paksa barang dagangan mereka”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 22 februari 2018).

Hal serupa juga dibenarkan oleh Ibu Sulistiyah (pedagang kue kering):

“Pas relokasi dilakukan saya emang masih tetap memilih untuk jualan ditempat lama mbak, untuk lapak yang dikasih pemerintah masih belum saya tempati. Lah gimana mbak pemerintah cuman ngasih sebuah kerangka lapak aja, untuk penutup dan lain-lain itu biaya sendiri. Sedangkan saya cuman jualan kue mbak, belum mampu. Lalu kalau

penjualannya disini kan lebih ramai ketimbang di tempat baru itu masih sepi”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 maret 2018)



Gambar 4.14 PKL yang tetap bandel
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Kusnadi (penjual Accecoris):

“Saat relokasi dilakukan saya langsung pindah mbak, awalnya ya gak mau. Tapi ya mau gimana lagi daripada dagangan kita kena razia, jadi ya nurut aja. Kalau saya membandel gitu pas ada pengontrolan ya sering mbak kena razia. Kita diakasih waktu buat beres-beres, kadang ya dibantu sama petugasnya biar cepat selesai. Kalau gak di bersihkan nanti barang kita diangkut”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2018).



Gambar 4.15 Wawancara dengan PKL yang direlokasi
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Dalam urusan penataan Para Instansi yang terkait mereka sudah cukup melakukan kejujuran. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Kepala Satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto:

“Kami dari Satpol PP dalam menata selalu berupaya untuk jujur, tidak ada yang namanya sodok-sodokan mbak”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2018)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Suroso pedagang pakaian, berikut penuturannya:

“Dalam masa penertiban para petugas yang menertibkan kita, mereka pada gak mau dikasih uang atau tips mbak, itu memang benar”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2018)



Gambar 4.16 Penjual baju
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sikap pelaksana dalam suatu kebijakan sangatlah mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas dalam hal pendataan, pembagian lapak dan pembinaan bagi pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja mereka bertugas untuk menertibkan para pedagang kaki lima (PKL). Dalam penemuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah baik. Baik dalam hal memberikan penegertian, tidak ada tips untuk bisa dimanipulasi, sedangkan untuk penegakan penertiban masih

kurang tegas. Hal ini dikarenakan para pelaksana kebijakan beralasan karena merasa kasihan.

d. Struktur Birokrasi

Variabel berikutnya adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang menjadi tolak ukur dalam keberlangsungan implementasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Adapun indikator yang digunakan dalam melihat sejauh mana keberhasilan suatu penerapan kebijakan adalah:

1) Standart Operating Procedures (SOPs)

Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedural operasional standar (SOP). Suatu kegiatan haruslah memiliki perencanaan atau planning kedepannya, begitu pula dengan penerapan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari demi memperlancar dan mendongkrak kinerja pegawai agar selalu konsisten maka diperlukan SOP dalam menjalankan tugasnya. Hal ini serupa dengan pernyataan ibu retno selaku staf Disperindag bagian perdagangan:

“Untuk memperlancar jalannya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto itu sudah ada SOP dan juga prosedur kerjanya jadi kita mengikuti saja. Kita melihat tugas pokok dengan baik dan fungsi serta program kerjanya, yang penting kan kita melakukan tugas pokok jadi menurut saya sudah sama saja berpedoman dengan SOPs mbak, yang penting kita mengerjakannya udah benar dan sesuai aturan”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2018).

Kemudian lebih lanjut Bapak Hatta selaku kepala sub Bagian perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto:

“Untuk memperlancar dan menjamin terlaksananya semua kegiatan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto kita memang beracuan pada SOPs dan Prosedur Kerja mbak. Didalamnya memuat masing-masing tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai mulai dari staf sampai Kepala Dinas hingga sampai ke koordinator yang bersangkutan”. (Hasil wawancara pada tanggal 2 maret 2018).

2) Wewenang

Pelaksanaan Kebijakan harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenang berbeda-beda sesuai dengan program yang dijalankan. Wewenang dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk mengatur dan menangani sesuatu untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Selain itu wewenang berguna untuk menentukan keputusan. Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Retno selaku staf di Disperindag Kota Mojokerto:

“Untuk terselenggaranya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto kita saling berkoordinasi dengan Satpol PP mbak. Dengan naungan berupa profil buku pedoman Disperindag dan Satpol PP yang didalamnya ada tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang mbak”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018).

Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh bapak Hatta selaku Kepala sub bagian perencanaan Satpol PP Kota Mojokerto:

“Kita dari Satpol PP diberi wewenang untuk mengontrol keadaan langsung dilapangan mbak. Misalnya ada permasalahan tentang pedagang kaki lima (PKL), lalu kita lapor pada saat rapat bersama. Ya sampai saat ini koordinasi kita masih berjalan dengan baik”. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2018).

Dari hasil wawancara diatas pihak yang terlibat dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto sudah melakukan kegiatan sesuai *engan Standart Operaating Procedures* (SOP) dan program kerjanya dengan baik guna untuk menunjang keberhasilan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) untuk jauh lebih baik, aman, dan sejahtera.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto:

a. Faktor Pendukung Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto

Faktor pendukung merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah implementasi kebijakan, suatu implementasi kebijakan tentunya memiliki faktor pendukung yang dapat membantu terlaksananya implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) membutuhkan faktor pendukung yang akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan penemuan dilapangan, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung yang terdapat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Pemerintah Daerah Kota Mojokerto mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan pertimbangan

maka Pemerintah Kota Mojokerto mengambil tindakan yaitu dengan jalan merelokasi. Dalam melakukan relokasi pemerintah telah menyediakan lahan dan juga alat penunjang lainnya. Pemerintah memberikan bantuan berupa kerangka lapak dan juga paving. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Retno selaku staf Disperindag dalam bidang perdagangan. Berikut pemaparannya:

“Pasca relokasi Pemerintah memberikan sebuah bantuan kerangka lapak aja mbak, dan juga paving. Pemerintah mebagi 2 ukuran kios mbak. 137 kios untuk 2.00 x 3.00 dan 110 kios untuk ukuran 1.25 x 3.00M”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2018). (Bisa dilihat



Gambar 4.17 Kios ukuran 2.00 x 3.00M
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018



Gambar 4.18 Kios ukuran 1.25 x 3.00M
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

2. Sosialisasi

Pemerintah Mojokerto memberikan wewenang terhadap para pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto untuk selalu memberikan sosialisasi terhadap para sasaran

kebijakan yaitu pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya sosialisasi maka diharapkan para pedagang kaki lima (PKL) bisa memahami kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk penataan pedagang kaki lima (PKL). Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Retno selaku staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Berikut pernyataannya:

“Kita dari disperindag selalu memberikan sosialisasi mbak, kita mengumpulkan para pedagang kaki lima untuk kita beri pengertian. Kita menjelaskan satu persatu tentang pint-point yang ada pada Peraturan Daerah yang ada”. (Hasil wawancara 20 Maret 2018).

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Hatta selaku Kepala sub bagian perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto:

“Satpol PP sama Disperindag selalu bekerjasama dalam memberikan sosialisasi pada para pedagang kaki lima mbak. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat mereka mengerti”. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2018).

Hal ini juga sesuai dengan penuturan pedagang kaki lima yang berjualan sandal Bapak Nardi:

“Disperindag selalu ngadain sosialisasi., kita dikumpulin semua, diajak berunding, dijelaskan bahwa ada peraturan dari Walikota yang harus ditaati demi kebaikan bersama”. (Hasil wawancara 22 Maret 2018).



Gambar 4.19 Kondisi saat Sosialisasi
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

3. Adanya Pengawasan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto memberikan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima, hal ini bertujuan untuk mengontrol kegiatan para pedagang kaki lima (PKL). Karena faktor pengawasan ini juga mempengaruhi dalam keberhasilan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Hatta selaku Kepala Sub bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto:

“Kita secara tim selalu mengontrol para pedagang kaki lima, baik yang sudah direlokasi maupun belum mbak. Hal ini dilakukan guna untuk mengontrol kegiatan para pedagang kaki lima, kita keliling Kota Mojokerto tiap 2 jam sekali”. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2018).

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Nardi pedagang sandal, berikut penuturannya:

“Satpol PP tiap 2 jam sekali selalu ngontrol mbak, mereka selalu keliling, jadi ya kita gak berani macam-macam. Kalau melanggar sedikit aja udah kena razia mbak”. (Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2018).



Gambar 4.20 Pengontrolan Satpol PP Kota Mojokerto
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018



Gambar 4.21 Kondisi Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Mojokerto
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung jalannya suatu Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto harus mempertimbangkan faktor pendukung guna untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan. Untuk mendukung jalannya kebijakan pemerintah daerah dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di kota mojokerto, pemerintah kota mojokerto memberikan dukungan sarana prasarana yaitu dengan menyediakan lahan dan lapak untuk ditempati para pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi. Selanjutnya kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara rutin oleh pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan pedagang kaki lima (PKL) yang belum mengetahui tujuan dilakukannya kebijakan menjadi mengerti. Adanya pengawasan terhadap kegiatan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan guna untuk memperlancar jalannya implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di

Kota Mojokerto agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto

1. Ketersediaan lahan

Pemerintah kesulitan dalam hal penyediaan lahan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Akibatnya tidak seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa direlokasi secara bersamaan. Berikut adalah penuturan dari Bapak Hatta selaku kepala sub bagian perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Berikut adalah pemaparannya:

“ Kota Mojokerto itu sempit mbak. Kita tidak bisa merelokasi pedagang kaki lima (PKL) secara keseluruhan, karena ya lahannya itu terbatas. Sedangkan jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang ada itu sangat banyak, jadinya ya kuwalahan”.



Gambar 4.22 Kondisi kesremawutan PKL Kota Mojokerto
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

2. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka. Anggaran mencapai posisi paling penting, karena dengan penyusunan anggaran maka segala kegiatan dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dimasa yang akan datang. Anggaran bermanfaat untuk membantu menunjang kebijakan yang ada. Selain itu anggaran bermanfaat untuk menentukan tujuan secara jelas dan logis (*dapat dilaksanakan*). Dalam bidang pengawasan anggaran bermanfaat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. Tujuan utama dari perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan saja tetapi didalam pelaksanaannya harus diadakan pengawasan agar benar-benar seperti yang direncanakan.

Anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Mojokerto lewat Dinas yang ditunjuk yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam membantu pedagang kaki lima (PKL) sangat kecil dan tidaklah terbuka. Hal ini bisa diketahui dari pemaparan Ibu rahmah selaku staf pada bidang perdagangan., berikut pemaparannya:

“Untuk anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto dengan jalan relokasi biayanya tidak terhingga mbak. Lalu untuk bantuan modal kita memang tidak memberikan bantuan modal sama sekali terhadap para pedagang kaki lima (PKL). (Wawancara pada tanggal 20 februari 2018).

Masalah ini diperkuat dengan penuturan Bapak Kusno penjual Sandal, berikut pemaparannya:

“Pemerintah gak ngasih bantuan modal mbak, kita usaha sendiri. Ya, caranya biasanya kita pinjam di bank. Pengennya kita ya pemerintah itu ngasih pinjaman modal, agar kta para pedagang dapat mengembangkan usaha. Soalnya kalau pinjam bank sekarang itu susah banget mbak”.

3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar

Pemberian sanksi kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang masih melanggar kurang tegas. Hal ini bisa dilihat dari penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang hanya sebatas penyitaan dan pembongkaran alat-alat dan barang dagangan saja. Pada realitanya masih banyak para pedagang kaki lima (PKL) yang masih tetap aja melanggar, padahal barang dagangannya sudah disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Jika melihat dan menerapkan pada peraturan yang ada seharusnya pedagang yang sudah ditertibkan namun masih tetap saja melanggar seharusnya diberi sanksi hukuman kurungan dan sanksi normative berupa uang yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Tetapi pemberian sanksi ini tidak pernah dilakukan karena alasan kemanusiaan. Hal tersebut sependapat dengan penuturan Bapak Sugiono selaku Kepala Bidang ketentraman dan ketertiban Satpol PP Kota Mojokerto:

”Untuk selama ini kami dari Satpol PP dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) hanya sampai sebatas penertiban, penyitaan dan pembongkaran saja mbak. Para pedagang kaki lima (PKL) hanya saya amankan, disita KTP (kartu tanda penduduk), penyitaan barang dan alat dagangan serta pembongkaran saja. Apalagi sanksi yang sampai kurungan atau bahkan denda, kita gak tega karena alasan kemanusiaan”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018)

Didalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 dijelaskan tentang ketentuan pidana bagi pedagang yang melanggar. Berikut adalah bunyi Perda nya.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

4. Tingkat Pendidikan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang relatif rendah

Hal lain yang menyebabkan Pelaksanaan pentaan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) terhambat adalah tingkat pendidikan para pedagang kaki lima (PKL). Tingkat pendidikan para pedagang kaki lima (PKL) rata-rata masih rendah. Banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tingkat pendidikannya SMP atau sederajat sehingga secara tidak langsung mereka kurang memiliki pengetahuan tentang masalah kebijakan yang diatur pada Peraturan Daerah no 5 Tahun 2005. Hal ini sependapat dengan pemaparan dari Ibu Beti selaku staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Berikut adalah penuturannya:

“Kesulitan kita pada saat sosialisasi untuk para pedagang kaki lima (PKL) itu pada faktor komunikasinya mbak, karena banyak pedagang itu yang gak ngerti maksud kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Kita harus pelan-pelan memberikan pengertian dan menjelaskan kepada mereka. Kan ya mohon maaf, banyak pedagang kaki lima (PKL) itu yang hanya lulusan SMP atau sederajat, Jadi banyak diantara mereka itu yang gak bisa paham dengan apa yang sudah kita jelaskan”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 februari 2018).

Hal ini diperkuat dengan penuturan dari pedagang kaki lima (PKL) sendiri yaitu Bapak Nariyo pedagang kerupuk. Berikut penuturannya:

“Saat Disperindag dan Satpol PP datang kesini untuk sosialisasi dan memberi tahu ada peraturan baru untuk pedagang kaki lima (PKL) saya kurang bisa mengerti apa yang disampaikan, mungkin karena saya ini cuman lulusan SD jadi gak bisa ngerti maslah seoperti itu”. (Wawancara pada tanggal 20 februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kota mojokerto yang pertama adalah ketersediaan lahan. Mengingat kota mojokerto itu sempit maka pemerintah kesulitan dalam mencari lahan guna untuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kota mojokerto, untuk saat ini yang bisa dilakukan relokasi hanya ada 2 tempat saja yaitu pedagang kaki lima (PKL) yang berasal dari alun-alun dan joko sambang saja. Dengan ketersediaan lahan yang sempit menjadikan pemerintah tidak dapat menata keseluruhan para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kota mojokerto. Kedua, Anggaran. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah misalkan untuk bantuan modal itu tidak ada, akibatnya para pedagang kaki lima (PKL) yang penghasilannya sedikit kesulitan dalam mencari modal. Ditambah lagi pemerintah kota mojokerto pada saat relokasi hanya memberikan bantuan berupa kerangka lapak dan juga paving saja, untuk selanjutnya biaya ditanggung oleh para pedagang kaki lima (PKL) sendiri, hal ini yang membuat para pedagang enggan untuk menempati lokasi yang telah disediakan dengan alasan tidak memiliki cukup modal untuk memperbaiki semuanya. Ketiga, Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar. Hal ini bisa dikatakan karena pada saat penertiban yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan hanya sebatas penyitaan dan pembongkaran saja, tetai tidak ada sanksi

yang lebih tegas lagi dengan alasan kemanusiaan, hal ini yang menjadikan para pedagang kaki lima (PKL) tidak memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada. Keempat adalah Tingkat pendidikan pedagang kaki lima (PKL) yang rendah. Banyak pedagang kaki lima (PKL) yang hanya lulusan SD, ada juga yang tidak bersekolah. Faktor pendidikan yang rendah dapat menghambat jalannya implementasi kebijakan ini, karena mereka tidak bisa secara langsung untuk bisa mengerti isi dan peraturan yang sudah diterapkan.

F. Analisis Data

Setelah melakukan wawancara dan observasi guna memperoleh data penelitian, kemudian data yang diperoleh dianalisa data. Data yang disajikan adalah data yang telah diolah oleh peneliti sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti, namun tanpa meninggalkan esensi dari data yang bersangkutan. Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya dilakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian dengan melakukan analisa berdasarkan data yang telah dihasilkan.

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto berdasarkan Model Implementasi George C. Edward III

Kebijakan Publik merupakan gambaran pola tindakan pemerintahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam lingkungannya. Menurut H. Hugh Heglo dalam Said Zainal (2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan masalah tertentu. Terdapat beberapa tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan.

Suatu Kebijakan dibuat dengan banyak pertimbangan tidak asal membuat suatu kebijakan, akan tetapi juga melihat dari sisi baik dan buruknya. Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward III (1980:148) yang menyatakan bahwa “Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak baik atau buruk bagi masyarakat. Tujuan kebijakan tidak akan tercapai jika suatu kebijakan tidak diimplementasikan. Dalam implementasi terdapat beberapa model implementasi yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti melihat fenomena implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto (khususnya relokasi dari alun-alun dan joko sambang ke benteng pancasila) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III terdapat 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti akan menjelaskan masing-masing variabel tersebut dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 5 tahun 2005 tentang tata cara penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

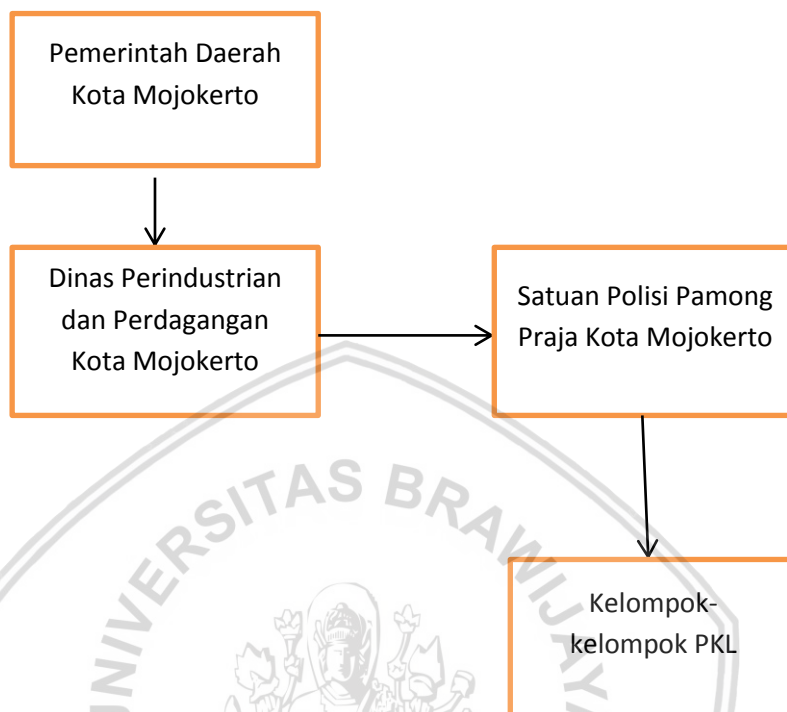
a) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Informasi kebijakan harus disampaikan kepada subyek kebijakan agar dapat mengetahui isi kebijakan dan apa yang harus dikerjakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward III dalam Agustino (2016:137) “Komunikasi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat”. Dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Kota Mojokerto tentang tata cara penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) komunikasi diperlukan agar seluruh pegawai mengetahui dan memahami bagaimana cara dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Dalam komunikasi George C. Edward III menggunakan 3 (tiga) indikator yang dipakai untuk mengukur variabel komunikasi pada implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

1) Tranmisi (Penyaluran Komunikasi)

Dinas Perindustrian dan perdagangan sebagai pelaksana kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang harus sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

Penyaluran komunikasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.



Gambar 4.23 Alur Komunikasi Implementasi Kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto

Sumber : Gambar olahan peneliti, 2018

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa alur komunikasi bersifat top-down, maksudnya dari tingkatan hierarki tertinggi ketingkat terendah, yakni dari aktor tingkat pusat ke badan-badan administrasi tingkat pelaksana sampai ketingkat terendah, maksudnya adalah Pemerintah Daerah atau Walikota Kota Mojokerto memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan ketua paguyuban. Dalam upaya penyaluran komunikasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto yang paling efektif adalah setelah adanya rapat, sosialisasi antara

Dinas dengan ketua paguyuban dan para pedagang kaki lima (PKL) yaitu secara tatap muka (*face to face*), telepon (*handphone*), maupun via *email*. Hal ini sesuai dengan pendapat Suranto (2010:14) menjelaskan bahwa komunikasi tatap muka (*face to face communicaton*) yaitu pihak-pihak yang berkomunikasi saling bertemu dalam suatu tempat tertentu, sedangkan komunikasi bermedia (*mediated communication*) adalah komunikasi yang menggunakan media seperti telepon, surat, radio, dan lain sebagainya.

Dari penemuan peneliti dilapangan penyaluran komunikasi yang telah disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tergolong teknik komunikasi informatif. “Komunikasi informatif adalah teknik komunikasi dengan menyampaikan pesan secara berulang-ulang unuk memberikan informasi kepada komunikan” (Suranto, 2010:14) atau dalam komunikasi ini pesan yang dimaksudkan adalah isi dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kai lima (PKL) di Kota Mojokerto.

George C. Edward III menyatakan dalam Agustino (2014:150) “penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula”. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan penataan dan pembinaan sudah baik dalam hal penataan dan pembinaan yang meliputi ketentuan kegiatan usaha, penertiban serta penggunaan tempat. Dalam hal penyaluran sosialisasi sudah terlaksana baik, tetapi alur komunikasi masih banyak kesalah fahaman antara dinas terkait dengan para pedagang kaki lima (PKL).

2) Kejelasan Komunikasi

Informasi yang disampaikan dalam komunikasi haruslah jelas. Edward III dalam Agustino (2014:151) menjelaskan bahwa “komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*start-level-bureaucratic*) haruslah jelas dan tidak membingungkan”. Berbagai komunikasi telah dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto khususnya untuk relokasi pedagang kaki lima yang berada di alun-alun dan joko sambang untuk direlokasi ke jalan benteng pancasila. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan cara menyampaikan tata cara dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang sudah tercantum di dalam isi Peraturan Daerah no 5 Tahun 2005

1. Ketentuan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pemerintah mengeluarkan Kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang diatur dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan Kota. Di Kota Mojokerto terdapat banyak sekali penyebaran pedagang kaki lima (PKL) yang berada di tempat yang seharusnya tidak untuk tempat jualan. Misalnya di trotoar, badan jalan, hal yang seperti itu menjadikan Kota Mojokerto menjadi semrawut. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah Kota Mojokerto dengan tegas untuk menertibkan para pedagang kaki (PKL) yang menempati tempat yang

tidak semestinya. Pemerintah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto untuk menertibkan para pedagang kaki lima (PKL).

2. Pembinaan pedagang kaki lima

Upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL) adalah dengan melalui unit teknis berupa bimbingan dan penyuluhan. Walikota Kota Mojokerto memberikan tugas kepada dinas yang terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto untuk memberikan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima (PKL). Dalam penemuan peneliti dilapangan bahwa Dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto telah bekerjasama dalam rangka pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Mereka bekerja sama dalam melakukan sosialisasi, memberikan pengertian kepada para pedagang kaki lima (PKL). Hal ini sudah sesuai dengan isi yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005.

3. Penggunaan Tempat

Pedagang kaki lima (PKL) yang ingin tetap menggunakan tempat umum seperti jalan umum, trotoar, badan jalan maka para pedagang kaki lima (PKL) haruslah mengurus izin terlebih dahulu yang sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Mojokerto No 19 Tahun 2012 Tentang Pusat Perdagangan Kaki Lima (PPKL) Kota Mojokerto. Hal ini dimaksud

karena para pedagang kaki lima (PKL) itu juga termasuk sebagai pusat pembelian. Tetapi pada kenyataan dilapangan para pedagang kaki lima (PKL) tidak ada yang mau mengurus izin persyaratan yang sudah dicantumkan. Mereka tetap saja bandel untuk berjualan di tempat umum. Hal ini yang menjadikan pemerintah geram pada pedagang kaki lima (PKL).

3) Konsistensi

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Terkait dengan konsistensi pesan yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto yang sudah dilakukan secara konsisten, yaitu selalu memberikan sosialisasi dan juga mengontrol keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di setiap sudut Kota Mojokerto setiap 2 jam sekali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno, 2017:177 bahwa “perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk dikerjakan”.

Terkait dengan konsistensi yang disampaikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto mereka selalu konsisten untuk mengumpulkan para pedagang kaki lima (PKL) untuk berembuk bersama, hal ini dilakukan agar pemerintah mengetahui apa yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima (PKL) begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward dalam Agustino (2016:136-142) yang menyatakan bahwa perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu

komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan, agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan tergantung dari ketersediaannya sumber daya yang dimiliki oleh badan-badan pelaksana. Menurut Edward III dalam Winarno (2007:181) dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, antara lain:

1) Sumber Daya Manusia atau Staf

Sumber Daya Manusia dalam implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto sangatlah dibutuhkan, meskipun kebijakan yang dibuat telah jelas dan telah diinformasikan dengan tepat, namun sumber daya manusia yang dimiliki tidak memadai, dalam artian tidak berfokus pada jumlah staf tetapi kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh riap-tiap staf, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2014:151) “penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan”. Dalam penemuan dilapangan peneliti menemukan bahwa Sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja kota mojokerto, sumber daya yang ada telah memadai tidaklah berkurang ataupun kelebihan jumlah staf yang menangani pedagang kaki lima (PKL), selain jumlahnya yang memadai akan tetapi segi

kemampuan dan keahlian telah disesuaikan masing-masing pegawai yang menduduki jabatan.

2) Sumber Daya Informasi

Informasi merupakan faktor penting kedua dalam ketersediaanya sumber daya dalam implementasi kebijakan. Informasi mengenai cara penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto dengan cara memberi pengumuman secara langsung lewat sosialisasi. Pengumuman informasi yaitu dengan didasari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto. Bentuk informasi yang diberikan dijabarkan melalui rapat atau sosialisasi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan. Dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja memberikan informasi secara langsung kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang akan direlokasi dengan cara berembuk, memberi pembinaan, dan memberi pengertian bahwa ada kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk menata para pedagang kaki lima (PKL) di kota mojokerto. Sasaran pertama yang akan dilakukan relokasi adalah pedagang yang berasal dari alun-alun dan joko sambang. Pemerintah mengambil tindakan ini karena pedagang yang ada di dua tempat itu sudah dianggap sangat semrawut. Banyak terdapat penolakan untuk awal disampaikannya informasi ini, tetapi para pelaksana kebijakan tidak mudah menyerah dalam menyampaikan informasi.

3) Sumber daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung juga harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, akan mustahil untuk mewujudkan kebijakan yang akan dilakukan. Abidin (2012:148) menyatakan “Faktor pendukung merupakan faktor utama internal dalam proses implementasi kebijakan”. Fasilitas pendukung implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) Kota Mojokerto adalah fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

Sarana dan prasarana yang paling penting adalah mobil patrol, mobil razia, truk sampah. Peralatan tersebut digunakan dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Edward III dalam Agustino (2014:151) mengatakan bahwa “Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang, tetapi tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil”.

4) Sumber Daya Anggaran

Dalam suatu pembangunan ataupun penataan agar tertata dengan rapi memiliki banyak prosedur penataan salah satunya adalah penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL.) Dalam penataannya membutuhkan anggaran atau

finansial yang tidak sedikit yang diperlukan oleh pemerintah untuk dapat menindak lanjuti penataan yang baik. Hal tersebut berdasarkan pendapat Andayani (2007:63) bahwa “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi sistematis untuk satu periode. Berdasarkan penemuan dilapangan pemerintah memberikan lokasi relokasi agar dapat tertata dengan rapi. Tetapi pemerintah tidak mau terbuka dengan berapa biaya anggaran yang telah dikeluarkan.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang terjadi menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi menurut Winarno (2007:194) menjelaskan jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan, begitupula sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan semakin sulit untuk diimplementasikan.

Dalam prakteknya para pelaku pelaksana kebijakan terhadap sasaran kebijakan yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pedagang kaki lima (PKL) bersikap baik. Maksud dari baik adalah dalam lapangan para pelaksana kebijakan sudah memberikan peringatan kepada para pedagang kaki

lima (PKL) yang berjualan ditempat yang sudah dilarang, jika ada pedagang kaki lima (PKL) yang masih membandel maka pelaksana kebijakan akan mengangkut secara paksa dagangan para pedagang kaki lima (PKL). Tetap dalam prakteknya pelaku kebijakan kurang tegas dalam melaksanakan kebijakan, maksud dari kurang bersikap tegas adalah sebagian besar masih adanya percampuran perasaan didalam pelaksanaan kebijakan, jadi yang terjadi seperti yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan hanya memberikan sebuah peringatan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang membandel dan membangkang.

d. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mengukur keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya struktur birokrasi. Menurut Edward III dalam Agustino (2014:153) bahwa “kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat jalannya implementasi kebijakan”. “Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan “ (Winarno, 2007:202).

1) Standart Operating Procedures (SOPs)

Standart Operating Procedures (SOPs) dimiliki oleh setiap organisasi pelaksana. SOPs menurut Agustino (2014:153) adalah “suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan SOP yang ditetapkan standar minimum yang dibutuhkan oleh warga”. Dalam prakteknya

bahwa Dinas yang terkait telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOPs dan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan terkait dengan pembagian kewenangan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah membagi tugas pokok dan fungsinya mulai dari tingkat paling atas sampai dengan tingkatan paling bawah, Selain itu hubungan Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja saling berhubungan dalam masalah pekerjaan, maksudnya adalah apabila ada perubahan ataupun informasi terbaru, kendala yang dihadapi dalam pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto dapat dikoordinasikan dengan baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

2) Wewenang

Kewenangan adalah salah satu otoritas yang menjadi landasan bagi para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Abidin (2012:154) menjelaskan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan”. Edward III dalam Agustino (2014:152) juga mengemukakan “pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Wewenang formal terkait Peraturan Daerah No 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) Kota Mojokerto dan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/819/417.111/2012 tentang

penetapan pedagang, jenis barang yang diperdagangkan, waktu berdagang dan lokasi lapak pada pusat perdagangan kaki lima (PPKL) Kota Mojokerto dan Keputusan Walikota Nomor 188.45/133/417.111/2016 tentang penetapan jumlah atau data pedagang, jenis barang yang diperdagangkan dan lokasi lapak pada pusat perdagangan kaki lima Kota Mojokerto. Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2012:154) menyatakan bahwa “kewenangan berkaitan dengan posisi organisasi yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya”.

Pada kenyataanya yang terjadi bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Walikota Mojokerto yang sesuai dengan buku pedoman, sehingga tugas yang dikerjakannya tidak tumpang tindih serta sesuai dengan masing-masing bidangnya.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto:

a. Faktor Pendorong

1. Sarana dan Prasarana

Dalam proses penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yaitu dengan cara merelokasi, Pemerintah Kota Mojokerto telah memberikan bantuan secara gratis terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yaitu berupa kerangka lapak dan juga paving. Untuk lapak Pemerintah

menyediakan kios yang dibagi menjadi 2 ukuran yaitu 2.00 x 3.00 ditempati untuk 137 pedagang dan ukuran kios 1.25 x 3.00M untuk 110 pedagang. (Bisa dilihat dalam lampiran).

2. Adanya Sosialisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto mengadakan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima (PKL) dengan cara mengumpulkan mereka untuk menjelaskan tentang kebijakan yang telah ada. Hal ini dilakukan agar para pedagang kaki lima (PKL) mengerti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL). Hal ini sesuai dengan pendapat Brian dan Lewia dalam Wahab (1997) ada salah satu syarat dalam pengimplementasikan kebijakan yaitu pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

3. Adanya Pengawasan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana, yaitu dinas terkait selalu mengadakan pengawasan terhadap jalannya proses kebijakan relokasi. Pengawasan dilakukan pada saat relokasi dilakukan dan setelah relokasi dilakukan. Satuan Polisi Pamong Praja selalu mengawasi para pedagang kaki lima (PKL) setiap 2 jam sekali. Hal tersebut sesuai dengan pendapat George Edward dalam Winarno (2002:126-151) salah satunya adalah sumber-sumber pendukung dalam

implementasi kebijakan untuk menunjang keberhasilan dalam pelayanan publik.

b. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

1. Ketersediaan lahan

Mengingat dalam suatu kota, tempat-tempat yang ramai dan banyak dikunjungi orang ialah tempat-tempat di pusat kota, maka para pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya memilih lokasi tempat yang kegiatan usahanya juga di pusat kota, seperti pada jalan umum, trotoar, alun-alun, badan jalan. Hal tersebut yang menjadikan kota terkesan semrawut, tak terkecuali di Kota Mojokerto. Dalam permasalahan ini pemerintah kota Mojokerto membuat solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Tetapi pada kenyataannya Pemerintah kota Mojokerto kesulitan dalam hal penyediaan lahan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Akibatnya tidak seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa direlokasi secara bersamaan. Sebenarnya pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Mojokerto itu banyak sekali tetapi karena keterbatasan lahan mangkanya yang bisa direlokasi terlebih dahulu hanyalah pedagang kaki lima (PKL) yang berada di alun-alun dan joko sambang saja, Pemerintah Kota Mojokerto tidak mempunyai lahan yang cukup luas guna untuk manajemen usaha.

Terbatasnya lahan di Kota Mojokerto menjadikan pemerintah kesulitan untuk menata pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota

Mojokerto. Semakin hari semakin banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditempat umum, tetapi pemerintah masih belum mempunyai strategi baru untuk mengatasi para pedagang kaki lima (PKL).

2. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka, anggaran seringkali disebut dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Anggaran bermanfaat untuk merumuskan rencana dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan, anggaran bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Tujuan anggaran adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai.

Pada kenyataannya yang ditemukan oleh peneliti, Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal anggaran mereka tidak terbuka, terkesan mereka malah menutup-nutupi. Akibatnya para sasaran kebijakan tidak mengetahui bagaimana proses dalam penataan pedagang kaki lima (PKL), bagaimana alur relokasinya, berapa anggaran yang sudah disediakan pemerintah untuk relokasi mereka tidak mengetahui semua itu. Hal ini

mengakibatkan kerancuan. Para pedagang kaki lima (PKL) merasa dirugikan dalam hal ini, karena mereka tidak bisa tau pastinya berapa anggaran yang sudah disiapkan sama pemerintah kota Mojokerto. Akibat dari ketidak terbukaannya ini, para pedagang kaki lima (PKL) berfikir buruk pada Pemerintah kota Mojokerto dan dinas yang terkait. Mereka beranggapan bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Hal seperti inilah yang menjadikan jalannya sebuah kebijakan menjadi terhambat.

3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar

Pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar selama ini kurang tegas, hal ini bisa dilihat pada penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang hanya sebatas penyitaan dan pembongkaran lapak dagangan saja. Pada realitanya banyak pedagang yang melanggar, hal ini dikarenakan petugas kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada para pedagang. Mereka tidak akan jerah jika tidak ditegaskan, banyak pedagang di kota Mojokerto yang masih membangkang dan tetap bersikeras untuk berjualan ditempat yang sudah dilarang. Para pelaksana kebijakan dalam masalah ini mengaku bahwa mereka tidak tega karena alasan kemanusiaan. Padahal dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 dijelaskan bahwa bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar maka akan ada sanksi kurungan pidana dan juga denda berupa uang. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh para pelaksana

kebijakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, hal itu dikarenakan mereka merasa kasihan. Tetapi jika terus dibiarkan tingkat kesadaran Pedagang kaki lima (PKL) tidak akan pernah ada. Yang pada kenyataannya saat ini malah semakin banyak ditemukannya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditempat umum.

4. Tingkat Pendidikan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang rendah

Pemahaman atau pengetahuan masyarakat mengenai isi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat diperlukan. Menurut Soekarno (2003) adanya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah kekurangan akan ketersediaan sumber-sumber pembantu seperti sumber daya manusia. Dari teori tersebut peneliti menemukan hasil penelitian dilapangan bahwa, masih kurangnya sumber daya manusia mengenai pemahaman dari pedagang kaki lima (PKL) tentang Kebijakan yang dbuat oleh Pemerintah. Kebanyakan para pedagang kaki lima (PKL) belum memahami akan manfaat dari adanya kebijakan ini, salah satu penyebabnya adalah faktor pendidikan yang rendah. Pendidikan adalah hal terpenting dalam hidup. Dengan Memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang bisa memperoleh pengetahuan yang belum mereka ketahui. Tetapi pada kenyataannya pendidikan untuk para kalangan bawah masih menjadi masalah. Banyak masyarakat kalangan bawah yang tidak bisa memperoleh pendidikan karena tidak mampu, salah satunya adalah para pedagang kaki lima (PKL). Banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Kota Mojokerto hanya

mengenyam sampai dengan sekolah sederajat saja. Akibatnya mereka tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Pemerintah Kota Mojokerto dalam menata dan membina para pedagang kaki lima terhambat. Karena para pelaksana kebijakan harus dengan sangat telaten dalam memberikan pengertian terhadap para pedagang kaki lima (PKL).

Tingkat pendidikan para pedagang kaki lima (PKL) rata-rata masih rendah. Banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tingkat pendidikannya SMP atau sederajat sehingga secara tidak langsung mereka kurang memiliki pengetahuan tentang masalah kebijakan yang diatur pada Peraturan Daerah no 5 Tahun 2005. Berdasarkan penelitian lapangan peneliti menemukan bahwa banyak pedagang yang tidak mengerti Peraturan Daerah itu seperti apa, isinya, dan peraturannya gimana. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja sudah pelan-pelan dan berulang-ulang dalam memberikan pengertian tetapi para pedagang kaki lima (PKL) masih ada saja yang tidak bisa mengerti. Ha ini dikarenakan tingkat pengetahuan mereka rendah, akibatnya dalam merespon adanya kebijakan ini menjadi lambat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kota Mojokerto merupakan salah satu Kota yang penduduknya mayoritas pekerjaannya sebagai pedagang, dengan banyaknya pedagang yang bermunculan (Khususnya pedagang kaki lima) menjadikan Kota Mojokerto menjadi semrawut. Pemerintah memiliki peranan penting untuk menatanya agar menjadi rapi. Dengan keadaan yang demikian pemerintah menindak lanjuti dan membuat Perda No 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) pada Kota Mojokerto. Implementasi dari kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang sudah berjalan dalam tahap penertiban pedagang kaki lima (PKL) terkait dengan sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Dalam pengimplementasian sudah relatif baik. Peneliti menggunakan model George C. Edward III untuk melihat tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto, adapun variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu penyaluran komunikasi tentang penataan yang meliputi proses penataan, lokasi, pendataan, serta pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tentang adanya kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Kebijakan

Pemerintah Daerah untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Komunikasi yang dilakukan sudah cukup jelas Karena pelaksana kebijakan telah menyampaikan kepada para sasaran kebijakan yaitu para pedagang kaki lima (PKL) sudah jelas tanpa ditutup-tutupi. Namun sayangnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima (PKL) sangat kurang, hal ini dikarenakan para pedagang kaki lima (PKL) tidak bisa menerima adanya Kebijakan Penataan ini.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan pertama adalah Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia atau Staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto telah memadai dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut para pelaksana kebijakan Kurang tegas dengan alasan kemanusiaan Untuk masalah kejujuran sudah cukup baik

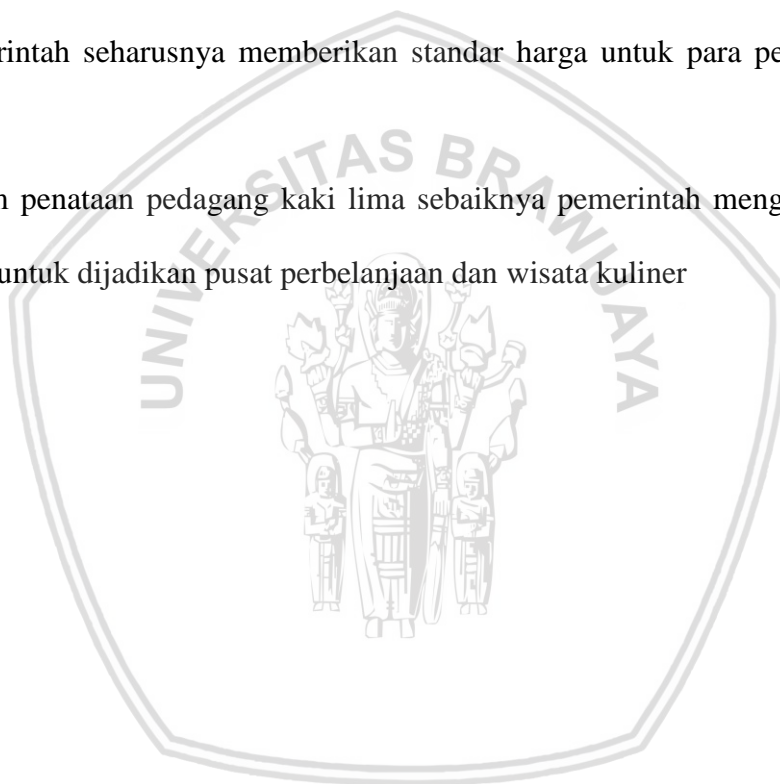
4. Sruktur Birokrasi

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas terkait sudah baik dan bertanggung jawab. Karena birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan

B. Saran

1. Melakukan pendekatan secara personal sehingga pedagang kaki lima merasa dihargai dan menampung aspirasi dari pedagang kaki lima sehingga mereka bisa mengutarakan apa saja sebenarnya yang pedagang kaki lima butuhkan.
2. Pada tahap pembinaan PKL, dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima seharusnya menggunakan pembekalan pembinaan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh pedagang kaki lima.
3. Pemerintah Kota Mojokerto sebaiknya melakukan perundingan rutin dengan PKL selama proses pembuatan lapak baru bagi PKL berlangsung. Pemerintah Kota Mojokerto juga sebaiknya memberikan perhatian kepada seluruh PKL yang melanggar aturan di wilayah Kota Mojokerto dan tidak terfokus pada satu titik seperti alun-alun Kota Mojokerto. Hal yang paling penting, Pemerintah Kota Mojokerto perlu mempertimbangkan lagi komponen yang baik untuk keberhasilan relokasi seperti ketersediaan lapak di area relokasi yang harus sesuai dengan jumlah PKL yang hendak direlokasi.
4. Lebih terintegrasinya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto yang bertugas dalam penanganan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, agar penataan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik. Relokasi atau penyiapan lokasi terkait pemberian lokasi berjualan dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Mojokerto juga memikirkan kepentingan pedagang kaki lima di lokasi lainnya, karena ditakutkan akan membuat kecemburuan sosial.

5. Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal anggaran tidak terbuka, seharusnya untuk mencapai keberhasilan implementasi pemerintah harus merinci dan memberi tahu bahwa anggaran yang akan digunakan.
6. Memberikan pengetahuan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang berpendidikan rendah. Misalnya: memberikan pengertian tentang cara membuat makanan yang bergizi dan higienis agar makanan yang diperjual belikan sehat.
7. Pemerintah seharusnya memberikan standar harga untuk para pedagang kaki lima
8. Dalam penataan pedagang kaki lima sebaiknya pemerintah mengelola tempat relokasi untuk dijadikan pusat perbelanjaan dan wisata kuliner



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*.Jakarta: Penerbit Pancur Siwah
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. ITS Press: Surabaya.
- Alisjahbana. 2003. *Urban Hiden Economy, Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya : Lembaga Peneliti ITS
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino Leo, 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung: Alfabeta
- Badudu, J. S, Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Budiharjo, Eko dan Hardjohubojo, Sudanti. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dunn. William N. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedrich, Carl J., 1963, *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Hendarto, Sri. (2001). *Catatan Kuliah Perancangan Geometrik Jalan*. Bandung: ITB.
- Manning, Chris & Effendi., Tadjuddin Noer. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal* di Kota, Jakarta:YOI
- Moleong, L.J (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Moleong , 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Pamudji, S. 1989, *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Walikota Mojokerto nomor 19 tahun 2012 tentang Pusat Perdagangan Kaki Lima (PPKL) Kota Mojokerto. Berita Daerah Kota Mojokerto tahun 2012 nomor 19. Mojokerto : Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.5 Tahun 2005 tentang penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Pasal 2 Ayat 1)
- Rose, Richard. 1969. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.
- Siagian, Sondang. P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Siagian Sondang P. 2000. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B., 1982, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan Kelima, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Theodore Lowi dalam Winarno 2002. *Kebijakan Publik (Public Policy)*. Alfa Beta. Bandung.
- Tjahjati, Budhy S dan Kusbiantoro, BS, (eds). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Van Meter, Donalds and Carl E Van Horn, "The Policy Implementation Process: a Conceptual Framework", *Administration and Society*, Vol.6, No.4, February, 1973
- Winarno, Budi. (2002) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta, Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Wirosardjono, Soetjipto.1985. Sektor Informal : Katup Pengaman. Mimeo.

Jakarta : LDFEUI.



Lampiran 1. Interview Guide

No	Fokus	Pertanyaan	Informan	Data Sekunder
1	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana cara pelaksana kebijakan untuk menyampaikan kebijakan - Bagaimana pendapat pedagang kaki lima - Apakah informasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana sudah jelas 	<ul style="list-style-type: none"> -Dinas Perindustrian dan perdagangan -Satuan Polisi Pamong Praja -Pedagang kaki lima 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah NO 5 Tahun 2005 - Peraturan Walikota No 19 Tahun 2012 - Peraturan walikota jenis dagangan pedagang kaki lima
2	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> -Apakah sumber daya yang disediakan sudah cukup - Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk kebijakan yang sudah dibuat 		
3	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> -Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima 		
4	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> -Untuk menunjang jalannya kebijakan prosedur apa yang dilakukan pemerintah Daerah Kota Mojokerto -Bagaimana pendapat para pedagang kaki limadengan adanya kebijakan Peraturan Daerah no 5 tahun 2005 - Dampak apa yang didapat oleh para pedagang kaki lima 		
5	Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan di kota mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> -Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pedagang kaki lima di kota mojokerto -Apa saja faktor penghambat dalam 		

		pengimplementasian kebijakan pedagang kaki lima di kota mojokerto		
--	--	--	--	--



Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Telp. (0321) 328704, Fax (0321) 328704
 email – bakesbangpol@mojokertokota.go.id
MOJOKERTO

REKOMENDASI

Nomor : 072/247 /417.405/2018

TENTANG

REKOMENDASI PENELITIAN

- Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011
2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
- Menimbang : Surat Permohonan dari Universitas Brawijaya Malang (UNBRA)
 Nomor : 338/ UN10.F03.11.11/PN/2018 Tanggal 10 Januari 2018
 Perihal : Ijin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Memberikan **REKOMENDASI** untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian kepada :

- a. Nama : Zumrotus Sholikah
 b. Alamat : Jl. Patimura Keboan Ngusikan RT 04 RW 02 Kab. Jombang
 c. Nomor Induk KTM/KTP : 145030101111129
 d. Judul/Thema : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
- e. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui , mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto
 2. Mengetahui , mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Mojokerto
- f. Tempat
1. Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
- g. Terhitung mulai tanggal : 01 Februari 2018 s/d 01 April 2018
 h. Nama Penanggung Jawab : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
 i. Alamat : Jalan . MT . Haryono 163, Malang 65145

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan mentaati tata tertib sebagaimana terlampir.

Mojokerto, 25 Januari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 MOJOKERTO



ANANG FAHRUJOJI, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I

NIP. 19670807 199203 1 005

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Walikota Mojokerto (sebagai laporan)
 2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
 3. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
 4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
 5. Yang bersangkutan

→

**Lampiran 3. Surat Riset/Survey untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Bakesbangpol) Kota Mojokerto**



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 338 /UN10.F03.11.11/PN/2018

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Walikota Mojokerto
Jl. Gajah Mada No 145
Kota Mojokerto

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Zumrotus Sholikhah
Alamat : Jl. Patimura Keboan Ngusikan RT 04 RW 02 Kabupaten Jombang
NIM : 14503010111129
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Prospek Kebijakan Pembangunan Perkotaan (Studi Kasus pada Kota Mojokerto)
Lamanya : 2 (dua) bulan
Peserta : 1 (Satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Yth. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto
2. Yth. Ka. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mojokerto
3. Yth. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto

Malang, 10 Januari 2018

Mengetahui,

an. Dekan

Prodi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

19690524 200212 2 002

Lampiran 4. Curriculum Vitae**CURRICULUM VITAE****DATA DIRI**

Nama : Zumrotus Sholikah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl/Lahir : Jombang, 19 Agustus 1995
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Patimura RT 04 RW 02 Ds. Keboan Kec. Ngusikan Kab. Jombang
Email : zumrotuslicha79@gmail.com
Ho. Hp : 085731443309

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. SDN Keboan 1, Jombang | 2002-2008 |
| 2. MtsN Bakalan Rayung, Jombang | 2008-2011 |
| 3. SMAN Kesamben, Jombang | 2011-2014 |
| 4. Universitas Brawijaya, Malang | 2014-2018 |



Lampiran 5. Data Relokasi pedagang kaki lima Kota Mojokerto

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 433 /417.111/2016

TANGGAL : 23 MARET 2016

DATA PEDAGANG DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN
PADA PUSAT PERDAGANGAN PADA PUSAT PERDAGANGAN PKL
(PEDAGANG KAKI LIMA) EKS JALAN JOKO SAMBANG YANG
BERADA DI JALAN BENTENG PANCASILA
KOTA MOJOKERTO

No	No. Lepak	Nama	Alamat		Jenis Barang Dagangan
			Kota Mojokerto	Daerah Lain	
1	2	3	4	5	6
1	1	HARIYONO	Jl. Gakarayam gang VI/14 Rt 1 Rw 1		SABUK, TOPI
2	2	NURUL MUTHOHAROH	JL. EMPUNALA 91A		JAM
3	3	MUHAMMAD RUSMAN	GEDONGAN GG VIII / 26		SANDAL, SEPATU
4	4	ARIEF SYAIFUDIN	JL. KEDUNGSARI RT.02/RW.03		TAS
5	5	SUPAAT		Dusun Mentoro Rt 01 Rw 05 Sumobito Jombang	KACAMATA
6	6	SH SUWITANING RAHAYU	Balongsari Gang IX no.2 Rt 1 Rw 3		JAM
7	7	EDY PURWANTO	LINGK. RANDEGAN RT 01/RW.02		PAKAIAN
8	8	SARTI		DSN PASINAN RT.03/RW.02 KEPUHANYAR MOJOANYAR	SANDAL, SEPATU
9	9	SRI RAHAYU PRIHATIN	SUMOLEPEN GG. SAWAH 15 Rt C2 Rw 04		SABUK, TOPI
10	10	ASIYAH	JL. BRAWIJAYA 118D Rt 02 Rw 03		TAS
11	11	YADI	JL. KAUMAN 2/10		SANDAL, SEPATU
12	12	HARIONO		Dusun Ngembul Rt 24 Rw 07 Punggul, Dlanggu	SANDAL, SEPATU
13	13	MUHAMMAD ISWANDI	Jl. Kauman II/10 RT 2.RW2		SANDAL, SEPATU
14	14	RAJIKAN		BANJARMLATI RT.03/RW.04 LENGKONG, MOJOANYAR	TAS
15	15	SUTRIENO	JL. SAWUNGALING 4-A Rt 03 Rw C4		TAS

1	2	3	4	5	6
16	16	MOCHAMAD SHOLEH	JL. KEDUNGSARI RT.02/RW.09		TAS
17	17	NUNIK SULISTYOWATI	Jl. Cakrayam gang V/ 14 Rt 1 Rw 1		Kacamata, Jam, topi
18	18	KARTIMAN	SURATAN V/7A		TAS
19	19	SOLIKAN		Dusun Jambangan Rt 04 Rw 04 Wringinrejo Sooko	TOPI
20	20	ZAELANI		Dusun Miaras Rt 4 Rw 2 Sumobito, Jombang	SABUK, TOPI
21	21	CHOIRUL ANAM	Lingk. Kedungsari Rt 2 Rw 2		JAM
22	22	ZAINAL ARIFIN		Dusun Pagerjo Rt 2 Rw 1 Pagerjo, Gedeg	PAKAIAN
23	23	ARIF MUJAHIDIN		Dusun Ngareslor Rt 001 Rw 001 Desa Ngareskidul, Gedeg, Kab. Mojokerto	TAS
24	24	MOH. HOLIK	PURWOTENGAH VIII/34		PAKAIAN
25	25	SMAIL	Trenggilis Rt 4 Rw 24		SABUK
26	26	SUJIANAH	Lingk. Kedundung Rt 4 Rw 1		PAKAIAN
27	27	AGUS SULISTYOWATI	JL. BRAWIJAYA 118B Rt 02 Rw 03		TAS
28	28	MACHFURI	GEDONGAN IX/17E		KACAMATA
29	29	DJUMALI		SAMBIROTO RT.05/RW.01 SOOKO	TOPI
30	30	FERRA HANDIANA	JL. YOS SUDARSO 24 Rt 8 Rw 3 Kauman		PAKAIAN
31	31	ADAM ROMADHONI	JL. SEKAR ABANG Rt 01 Rw 02		PAKAIAN
32	32	SUHERMAWAN	JL. YOS SUDARSO 24 Rt 6 Rw 3		PAKAIAN
33	33	NIRMATUL LUALIK	JL. SUROMULANG BARAT V No. 14		PAKAIAN
34	34	SAIFUL ARIFIN	Prajuritkulon III Rt 01 RW 03		PAKAIAN
35	35	MOH. NGAINUR ROFIQ		JL. RA. BASUNI SOOKO VIII NO.52	Aksesoris
36	36	SARMUN	Sumolepan Gang Sawah No. 47-B		PAKAIAN
37	37	SUJAT NURWIKO	JL. EMPUNALA 91A RT 003 RW 003		JAM
38	38	KASLATI	CAKARAYAM I/5A Rt 01 Rw 01		MAINAN
39	39	HARTONO	SURONATAN RT.02/RW.02		PAKAIAN
40	40	MOCH. ANGGRIIS MARYO BL	JL EMPUNALA 93		PAKAIAN
41	41	DIKKY ARIFAH NUGROHO	Sumelepan Gang Sawah 47B Rt 01 Rw 01		PAKAIAN

1	2	3	4	5	6
42	42	NURHAYATI		MENGELO UTARA RT.03/RW.09 SOOKO	PAKAIAN
43	43	NUR CHOLIQ	PURWOTENGAH II/48		PAKAIAN
44	44	ANA AMRINA ROSYADA		LESPADANGAN RT.07/RW.06 TERUSAN, GEDEG	PAKAIAN
45	45	JOKO SLAMET HARIYANTO	SIDOMULYO VI / 12 RT.03/RW.01		PAKAIAN
46	46	SUHASAN	Banjar Anyar Gang Masjid 20 Rt 2 Rw 2 Wales		PAKAIAN
47	47	KUSYO MARTONO	KALIMATI III/11 B Rt 03 Rw 01		PAKAIAN
48	48	LINDO WIDIARTO	KALIMATI IV/30 A Rt 01 Rw 02		PAKAIAN
49	49	SOEKIJAN	PURWOTENGAH VIII/32 Rt 02 Rw 01		PAKAIAN
50	50	AMBAR SAFRI	GEDONGAN 8/10A		PAKAIAN
51	51	SUBAEN	GEDONGAN II/31		PAKAIAN
52	52	BUSARA	Sumolepan Gang Sawan 47 B Rt 01 Rw 04		PAKAIAN
53	53	SAPAR	KALIMATI III/11 B		PAKAIAN
54	54	H M CHOSIM	JL. PANDERMAN XII/12		PAKAIAN
55	55	SARJI	KEDUNGSARI RT.01/RW.01		PAKAIAN
56	56	MOCH NUR KHOLIK	JL. SEKAR ABANG RT.01/RW.02		PAKAIAN
57	57	SRI RIWAYATI	JL. SEKAR ABANG RT.01/RW.02		PAKAIAN
58	58	SRI WINARSIH	JL. EMPUNALA 57 Rt 2 Rw 3		Jam Tangan, Accessories
59	59	MUSLICHAN	KALIMATI IV/30A Rt 01 Rw 02		PAKAIAN
60	60	ACHMAD RAGIL	KALIMATI IV/30C		PAKAIAN
61	61	MOH TAUFIQ	PURWOTENGAH VII RT.02/RW.01		PAKAIAN
62	62	SUKARNO	MENTIKAN 4/20		PAKAIAN
63	63	SUHERIONO		Dusun Montoro Rt 01 Rw 02 Desa Montoro Sumobito Jombang	PAKAIAN
64	64	MAS'UD	Lingkungan Kedungsari Rt 03 Rw 03		PAKAIAN
65	65	ERIKA RAHMAWATI	Purwotengah II/14 Rt 03 Rw 01		PAKAIAN
66	66	EKO PRASETYO		MENGELO TENGAH RT.01/RW.10	PAKAIAN
67	67	MUHAMMAD AFFIN ARIEF YANTO	PURWOTENGAH II/22		PAKAIAN
68	68	ERIKA SUSANTI	JL. SAWUNGALING 4A Rt 01 Rw 04		PAKAIAN

1	2	3	4	5	6
69	69	SUROTO	JL. RA. BASUNI SOCKO VIII NO.52		PAKAIAN
70	70	LAILA JUMATIN	PURWOTENGGAH II/16		PAKAIAN
71	71	H. SAMSUDI	PURWOTENGGAH II/14		PAKAIAN
72	72	TONI ARIYANTO	KEDUNGKWALI III TIMUR 22		PAKAIAN
73	73	SUPARNO	Empunala Gang Balai Desa No. 57 A		PAKAIAN
74	74	MUHAMMAD	Empunala No 47 D		PAKAIAN
75	75	SUGENIS WIDODO	PURWOTENGGAH II/48		PAKAIAN
76	76	SYAMSUL ARIFIN	KEDUNGKWALI 3 TIMUR 22 RT. 02/RW.02		PAKAIAN
77	77	ABD. AZIZ	SUMOLEPEN GG. SAWAH 473 Rt 01 Rw 04		PAKAIAN
78	78	SHOHIBUL MISHFAR	Purwotengah VII No. 11		PAKAIAN
79	79	EDY YULIANTO	PURWOTENGGAH VI/35		PAKAIAN
80	80	KASINAH		BANJARMLATI RT.03/RW.04 MOJOANYAR	PAKAIAN
81	81	ABDULLAH	MENTIKAN SWADAYA II/16B Rt 01 Rw 02		PAKAIAN
82	82	ISTIAH	JL. BALONGSARI VIII/15A		PAKAIAN
83	83	MARIA HIDAYAH	JL. EMPUNALA 91A		PAKAIAN
84	84	ZAINAL MAS'UD	KALIMATI IV 30 C		PAKAIAN
85	85	SHOLIKIN	Jl. Sokar Putih Rt 001 Rw 002		PAKAIAN
86	86	AGUS DENY RACHMAN	KALIMATI IV/300 Rt 01 Rw 02		PAKAIAN
87	87	ABDUL BASYIR	KEDUNGKWALI III Timur 22 Rt 02 Rw 02		PAKAIAN
88	88	CHOIRUL ANAM	Griva Permafala Meri A5-39		PAKAIAN
89	89	AKHMAD FAUZIE	KALIMATI IV Rt 001 Rw 002		PAKAIAN
90	90	H. SUHDI	PURWOTENGGAH VII/28		PAKAIAN
91	91	HJ NUR FADILAH	PURWOTENGGAH II/14		PAKAIAN
92	92	DINI KAFANILLAH	SURATAN NGAGLIK II/63 Rt 02 Rw 04		PAKAIAN
93	93	RONI TRIANTO	KALIMATI IV/30		PAKAIAN
94	94	NURUL HUDA		DALEMAN NO.222 RT.01/RW.04 SOOKO	PAKAIAN
95	95	SUMARDI	KALIMATI IV/10		PAKAIAN
96	96	ZAINAL ABIDIN	JL. SUROMULANG BARAT V/14		PAKAIAN
97	97	MOCHAMAD ARIFIN	KALIMATI IV/30B		PAKAIAN
98	98	BUDI SANTOSO	JL. JAKSA AGUNG SUPRPTO		PAKAIAN
99	99	ACHMAD JAINURI	PURWOTENGGAH VII/72 Rt 04 Rw 01		PAKAIAN
100	100	MAS'UD YUDI BUDIMAN	JL. MERI NO. 116		PAKAIAN

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALON JENIS WARUNG DAN JAJANAN/KUWE/ROKOK PALEN
Untuk Kios ukuran 2.00 X 3.00 M sebanyak 49 pedagang

UND	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Freddy Soebianto	Jl. Pangrango 2/8 Kerlungung Indah	Warung minuman/Makanan
2	Aryandoko Djolo W	Kradenan II/13 Mojokerto	Kuwe putu
3	Supadi	Bancang 1/32	Warung Bakso
4	Mujiono	Kradenan 3/13	Warung Kopi
5	Siti Kottjah	Kauman, VI/12	Warung Bakso
6	Moelyono	Magetan 1/59 RT. 01 RW. 01	Warung Minuman
7	Sardi	Kauman 9/7 RT. 02 RW. 02	Warung Nasi Pecel
8	Hidayat	Kradenan I/7	Warung Soto Ayam
9	Witanto	Umbuldamar RT.02 RW.01 Binangun Blitar	Warung Mie Ayam
10	Tumidjan Cipto Utomo	Kauman V/15 Sidogede	Warung Gado-gado
11	Pungky Eko S.	Kauman VI No. 16	Warung Kupang
12	Khairul Anam	Kauman VIII/37 RT. 04 RW. 01	Warung Soto Ayam
13	Djumani	Kradenan 3/1	Warung Kopi
14	Rachmat Hanif	Suronatan VIII/8A	Warung Bakso
15	Asma'I	Kauman III/7 RT. 03 RW. 02	Warung Lontong Kikil
16	Siti Rahayu	Kauman 1/1A	Warung Gado gado
17	Siama	Kauman Gg. VI/12	Warung Bakso
18	Yudi Pramono	Losari Barat RT. 01/RW. 02 Sidoharjo Gedek	Gorengan
19	Sri Utami	Kradenan IV/30	Soto Ayam
20	M. Miftakul Alam	Jatikulon RT. 05 RW. 01 Lengkong Mjanyar	Martabak
21	Wahyudi	Dsn.Gading RT.04RW.II Ngrame Pungging	Roti Goreng
22	Siti Aisyah	Kradenan III/27	Warung Minuman
23	Iskandar	Kradenan 3 / 8	Warung Pecel
24	Kusnan Hadi	Pekayon III/118 Kel. Kranggan	Warung Nasi Goreng
25	Slamat Rendi	Kradenan V/116	Warung Ikan Bakar
26	Sukiati	Sukorame RT.23/RW.07 Penempok Jetis	Warung Kopi
27	Beno Mude'i	Kauman V/14	Juice & Pop Ice
28	Astulik	Kradenan IV/32	Kue Putu
29	Sumiatun	Lingk. Pulowetan RT. 04 RW. 01	Warung Pecel
30	Kasiyati	Kradenan III/21 RT. 04 RW. 03	Kuwe putu
31	Kustinah	Kradenan 1/5	Warung es campur
32	Saturnin	Delik RT.02 RW. 01 Balongmojo Puri	Pisang Molen
33	Anang Roshyani Rofit	Panderman	Warung
34	Suwono	Prajuritkulon VI/87 RT.01 RW.02	Aneka Kuwe
35	Andik Prenoto	Sanggahan RT03 RW. 01 Soko	Pop Ice
36	Handro Dyastuti	Kauman I/10	Warung Ikan Bakar
37	Misnani	Ds. Tambak Kemerakan RT.02 RW.01	Kupang Jontong
38	Sri Wahyuni	Kauman V/16 RT.01 RW.01	Warung Ikan Bakar
39	Solikah	Jl. Al Muttaqin Pulowetan RT. 03 RW. 02	Warung Bakso & Es
40	Samsul Huda	Kradenan III/37	Warung Ikan Bakar
41	Sudjito	Kauman 6/43 RT. 02 RW. 02	Warung Kupang Lontong
42	Sunarsi	Mbudug RT.03 RW.01 Tugu St.rejo Jombang	Warung
43	Sarjono	Ds. Pulowetan RT. 02RW.03 Pulorejo	Warung Mie Ayam
44	Galot Iswandi	Kauman 6/42 RT. 02 RW. 02	Warung Soto Daging
45	Supiah	Kauman 4 / 21	Warung Nasi
46	M. Dauni	Dn. Garu Pororoto RT. 12 RW.03 Jombang	Warung Bakso
47	Zainul Anwar	Balonsari Gn. II No. 10A	Warung Chinese Food

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALON
JENIS SOUVENIR, ACESORIS, KELENGKAPAN BERPAKAIAN
Untuk kios ukuran 2,00 X 3,00 M sebanyak 19 pedagang

UND	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Harmani	Lingk. Keb RT. 01 RW. 05 Gn.Gedangan	Bibit Minyak wangi
2	Hendri Sihemari	Kradenan 4/20 RT. 03 RW. 03	Daster/acesoris
3	Kesivani	Kradenan 4/20 RT. 03 RW. 03	Acesoris
4	Mohammad Fala	Jelangan 8/04 Mojokerto	Dampet
5	Nurul Hidayati	Jawanggaling 4 F	Sandal
6	Yunfan	Suredinawan Tengah 12 RT.01 RW.01	Acesoris
7	Setyaningraen	Ngagih, Gotong Royong VI RT05/04	Acesoris
8	Nanik	Surojo 10 Majid Sukomanunggal SBY	Acesoris
9	Sukarno	Magersari 1/24	Sandal
10	Nur Hasan	Jl. Kamboja Blok 2B Pendok Teratai Soko	Buku & Kopyah
11	Dwi Wibowo	Lingk. Kedungsari RT.04 RW.02 Gn.Gedangan	Sandal
12	Ahmad Yusuf	Jl. Sawunggaling 4 F	Sandal
13	Lufian	Jl. Empu Gandring 60	Tas
14	Ratna Yulis	Kauman 5 / 29	Acesoris
15	Mochammad Rajini	Jl. Mesi RT. 01 RW. 02 Meri	Topi
16	Yani Bambang P	Lingk. Gajah M 03 RW.02 Prajurit Kulon	Batu Akik
17	Muslimah	Jl. Panderman XIII/15 Mojokerto	Sandal
18	Ta Yulianto	Jl. Sawunggaling 10/7	Sandal
19	Akmal Sayuti Hasibuan	Kauman 1/30	Topi & snl

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALON, JENIS PAKAIAN & BAHAN KAIN
Untuk kios ukuran 2,00 X 3,00 M sebanyak 20 pedagang

UND	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Candra Prima Putra	Kauman 5 / 29 RT. 04 RW. 01	Aneka 'Joan
2	Anang A. Sidiq	Jl. Anjono RW.10 RT. 01. RW. 02	Pakaian dalam
3	Supriyo	Mentikan 1/34 A	Pakaian
4	Moch. Dzurjanik	Jl. Tropika 762 Meri	Kaos kaki C.d.
5	Agus Bukheri	Mentikan 2/27 Mojokerto	Pakaian
6	Abd. Ghofar	Sumolapan Gg. Sawah 1-8	Pakaian
7	Supriyanto	Kauman 3 / 11	Pakaian
8	Martutiani	Kauman Gg. II / 22 RT. 02 RW. 02	Pakaian Anak
9	Suhani	Kauman 1/18	Pakaian anak
10	Joko Wiyono	Suredinawan I Tengah No. 3 B	Kerudung
11	Raimon Mando	Jl. Pajang 38 Magersari Indah	Pakaian
12	Dony Yusuf Samanto	Den. Bagisno RT. 03 RW. 03 Terusan Gedek	Pakaian
13	Salamah	Kredusan IV/30 RT. 03 RW. 03	Pakaian
14	Mardi Bima Sakti	Karanggen III / 49 A	Kaos Kaki
15	Achmad Imam Tauchid	Sidomulyo VIII/4A RT 03 RW. 03	Pakaian
16	Eksan	Sidomulyo 1/4A	Pakaian
17	Muji Priyanto	Gempelkrep Gedek RT 1 RW 1	Pakaian
18	Kuswatin	Jl. Empu Dhamojo 3 RT.04 RW.03	Pakaian dalam
19	Ahmad Yudi	Magersari 1/70	Pakaian dalam

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG LINGK. TROPODO
JENIS PAKAIAN, TOPI, SABUK
Untuk kios ukuran 2.00 X 3.00 M sebanyak 7 pedagang

UND	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	WIYONO	Jl. Tropodo, RT/RW, 003/001	Pakaian
2	SUPAJI	Jl. Tropodo, RT/RW, 004/001	Pakaian
3	KUSNAN	Jl. Tropodo, RT/RW, 002/002	Pakaian
4	MISDI	Jl. Tropodo, RT/RW, 004/002	Pakaian
5	SUMIRAN	Jl. Tropodo, RT/RW, 003/002	Pakaian
6	REBAN	Jl. Tropodo, RT/RW, 003/002	Makanan/Minuman
7	SULAIMAN	Jl. Tropodo, RT/RW, 003/001	Makanan/Minuman
8	KARSONO	Jl. Tropodo, RT/RW, 003/001	Makanan/Minuman
9	SUNGKONO	Jl. Tropodo, RT/RW, 002/001	Makanan/Minuman
10	SUYADI	Jl. Tropodo, RT/RW, 001/001	Pakaian
11	RUDY	Jl. Tropodo, RT/RW, 004/002	Pakaian



DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALON
JENIS MAKANAN/ JAJANAN/ MAKANAN RINGAN
Untuk Kios ukuran 1,25 X 3,00 M sebanyak 49 pedagang

JUMLAH	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Sadeli	Sentanan III / IB	Kuw
2	Eko Widodo	Kauman V/1	Pop Ice
3	Nur Hadi	Mentikan IV/32	Minuman Es
4	Wulansari	Kongkungan RT. 02 RW. 01 Kemantren Gedek	Minuman es
5	Supiah	Sentanan Gg. Buntu II/7	Kopi dan Jamu Sinom
6	Isjro' Aqfani	Kauman 5	Sosis/Pop Ice
7	Musak Tonia	Kauman X/3	Sosis
8	Ahmadi	Kauman VI/2 Mojokerto	Makanan/minuman
9	Andik Kurniawan	Selotangi Bl. San Gedek	Minuman Es
10	Sutrisno	Pulowetan RT.04 RW.02 Kel. Pulorejo	Pop Ice
11	Amin Syafi	Unggahan RT.01 RW.03 Banjaragung Puri	Arumanis
12	Sumarkin	Kauman IV	Pop Ice
13	Mariyadi	Nembos RT.01 RW.07 Pundeh sari Wonogiri	Warung Bakso/Mi Ayam
14	Sumardi	Balonjaya Baru RT.02 RW.05	Lesehan Krupuk
15	Nuriyati	Kauman I/50A	Minuman
16	Sarti	Jl. Wabulatan RT.01/02 Da Pulorejo	Warung Nasi Bungkus
17	Putri Dwi Khairama	Jl. Pangrango 2 KDI	Pop Ice
18	Priyono	Kauman 7/14	Es Oyen
19	Ika Yudo Dudi Rahayuningsih	Kedungpungut RT. 01/RW. IV Pungging Kab. Merto	Kaos kaki
20	Mariyun	Cakrayam IV/12	Jagung bakar & Kopi
21	Agung Rahmanto	Jl. Wabulatan RT.04 RW.01 Desa Pulorejo	Warung Bakso
22	Choirul nisah	Dsn. Laban RT.02 RW.03	Jajan Pasar
23	Mastulik	Kauman 6/20	Tempura
24	Akhmad Jaini	Dsn. Tumpak RT.27 RW.05 Gedek	Arumanis
25	Misiyem	Dsn. Terusan RT.04 RW.05 Terusan Gedek	Kacang
26	Binti Aminah	Sawunggaling 4F	Pop Ice
27	Suhartono	Kauman V/16 Mojokerto	Pop Ice/Sosis
28	Lasinten	Dusun Laban RT.02 RW.03 Minip Jetis	Jajan Pasar
29	Suyalno	Tawang RW.4 RT.05 Ngupit Skherjo Jateng	Es Puter
30	Suhariyanto	Suratan Ngaglik Gg. Baru RT. 04 RW. 04	Aneka Buah
31	Sumah	Gong Musholla RT.03 RW.01 Brawo Kedundung	Jagung bakar
32	Nuriyati	Kauman IV/05	Aneka minuman
33	Sarino	Kradenan 4	Makanan Ringan
34	Siti Chaula	Kauman VII/24	Warung Kopi
35	Choiri Ummah	Cakrayam III/4	Camilan
36	Sukman	Ploso Kuning RT. 03 RW. 02 Penompo Jetis	Rokok
37	Titik Khoiriyah	Jl. Prapanca 46 Mentikan Mojokerto	Minuman
38	Djuwaini	Bicak RT. 02 RW. III Trowulan	Es Tebu
39	Indra Nurul H	Ngingas RT.07 RW.02 Ngastemi Bangsal	Makanan Ringan
40	Siti Khalimah	Jl. RT.01/RW. IV Banjaragung Puri Kab. Mojokerto	Minuman Es Tebu
41	Sarmiati	Jl. Taman Siswa 45 Kel. Purwotengah	Pop Ice
42	Panaji	Cakrayam Gg. Buntu 27	Warung Kopi
43	Munarsih	Kauman V No. 41 Sidogede Mojokerto	Warung kopi
44	Nursiyah	Jl. Raya Pulorejo RT.01 RW.01 Pulowetan	Nasi Pecel Lesehan
45	Moch. Kurniawan	Kradenan III/13 Kauman	Pop Ice

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALOON
JENIS ACESORIS/ SOUVENIR/ PERLENGKAPAN BERPAKAIAN/ BUKU /POSTER
Untuk Kios ukuran 1.25 X 3.00 M sebanyak 25 pedagang

UNDI	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Alfan Akhsani	Jl. Prajuritkulon 4 /66 B Sabuk Prajurit Kulon	Buku bacaan
2	Sofa Handayani	Kaumari IX/15 C	sandal
3	Supriyadi	Link. Boto RT.01/01 Ds. Boto Prajurit Kulon	Sandal
4	Kasran	Cakrasari Baru RT.02/RW. III	Sandal
5	Sholikhudin	Dn. Kdgallih RT.04 RW.02 Sgallih	Acesoris
6	Sukoto	Jambongo RT.02 RW.02 Soko	Sandal
7	Henatik Indarwati	Kandangan RT.02 RW.01 Cmgrejo Kesamban	Sandal
8	M. Zaenal Arifin	Jl. Raya Pulorejo RT. 02/ RT. 01	Arloji
9	Sunartono	Dsn. Jetis RT.02 RW.IV Banjaragung Puri	Sandal
10	Nur Saifi	Wates Gg. Dahle 14	Acesoris
11	Utomo	Prajurit Kulon V RT. 01 RW. 02	Sabuk&dompet
12	Iwan Santoso	Dn. Kemantren RT.03 RW.01	Kacamata
13	Suyanto	Jl. Keranglo Gg. Baru 1 RT.02 RW. 02 Wates	Sandal
14	Achmad	Jabon Tegalsari RT.10 RW.05 Jabon Mjanyar	Songkok
15	Semlati	Magersari Gg. Buntu	Poster
16	Minarsih	Jl. Prapada	Peralatan Dapur
17	Teuku Iyos	Taplak Utara RT.01 RW.01	Leter/pigora
18	Roshan Anwar	Jl. Raya Pulorejo RT.01 RW.02 Pulorejo	Acesoris
19	Yuli Irawan	Prajurit Kulon 4/240 RT. 02 RW. IV	Sandal
20	Chusairi Abdul Goni	Suratan Gg. Tengah 239 A	Batu Alik
21	Sumarno	Gambiran RT. 10 RW. 02 Kwatu Mojoanyar	Kacamata
22	Sumariyah	Kedunggallih RT.08 RW.03 Tarik Sidoarjo	Poster
23	Achmad. Basori Alwi	Kauman VII/34	Sandal
24	Sumarni	Mijbaru 1/ 19	Buku bacaan
25	Suwarto	Griya Kharisma Asri D23 Brangkal	Alat Tulis

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALOON
JENIS PAKAIAN & BAHAN KAIN
Untuk Kios ukuran 1.25 X 3.00 M sebanyak 15 pedagang

UNDI	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Nurwacidi	Jl. Murbel 15 Magersari Indah	Pakaian
2	Ujang Tanjung	Sinoman VII / 22A	Pakaian
3	Hadisita	Banjaranyar Gg. Masjid 26 Wates	Taplak
4	Isral	Jl. Mo'opahit 26	Pakaian dalam
5	Viki Yanunanto	Kauman V/56	Kaos Kaki
6	Sokib Aziz	Kauman, V/5B Mojokerto	Sandal
7	Siti Julaiqah	Karanglo Gg. Baru 6 Wates	Pakaian Dalam W
8	Ika Ratnawati	Mentikan gg. Tanggul IV/37B	Pakaian anak
9	Suratman, H.	Mentikan IV/35B	Pakaian
10	Sukarno	Prabon Kesamban RT.03 RW.06 Blimbing Kesamban Jbang	Pakaian
11	Sudarnan	Pulowetan RT.01 RW.01 Pulorejo	Pakaian anak
12	Nurul Fitriyah	Purwotengah III/13	Pakaian

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALOON
JENIS MAINAN UNTUK ANAK-ANAK
Untuk Kios ukuran 1,25 X 3,00 M sebanyak 15 pedagang

UNDI	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Moch. Rupli	Desa Kepuhanyar RT.02/RW.03 Mojoanyar	Balon Anak-anak
2	Aslikan	Kedungsari RT.02 RW.01 Gunung.Gedangan	Bonoka
3	Sunaryo	Kradenan 1/5	Bonoka/Poster
4	Mochamad. Yasin	Jl. Empu Supo RT.05 RW.01	Balon anak-anak
5	Rudianto	Jl. Empu Supo RT.05 RW.01	Mainan anak
6	Kusno	Wagir PT 06 RW.03 Tanjekkagir Krombung Sidoarjo	Kapal Minyak
7	Kasali	Brawijaya 50A	Aneka mainan anak
8	Anite	Kradenan III/13 Kauman	Bonoka
9	Sriati	Karanglo VII 24 Mulyosari	Aneka Mainan
10	Moch. Anilin	Kradenan III/12 Kauman	Mainan Anak
11	Mujizah	Mentikan 1/51	Aneka mainan anak
12	Umi Hanik	Sidomulyo 9/18A	Bonoka
13	Nur Dian Syah	Jl. Puloarjo VI RT. 02 RW. 02	Mainan anak
14	Mustofa	Losari barat Sidoharjo RT.01 RW. 01 Gedek	Aneka mainan anak
15	Eny Choirahli	Kradenan III/0 RT.04 RW. 03 Kauman	Aneka mainan anak

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALOON
JENIS BARANG ELEKTRONIK/VCD
Untuk Kios ukuran 1,25 X 3,00 M sebanyak 6 pedagang

UNDI	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Djuwati	Magersari 1/46	VCD
2	Sunari	Magersari 1/46A RT.01 RW.01	VCD
3	Dondik Alex Setyo P	Terusan RT.013 RW. 02 Gedek	Perdeng. LPG
4	Samsu	Trenggillis Lor RT.02 RW.01 Bulo	Alat Tukang
5	Muslimin	Banci Kemantren RT.21 RW.06 Gedek	Lampu/alat listrik
6	Fatikhul In'am	Jl. Empu Nala 279 D Mojokerto	Cassing HP

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALOON
JENIS ROKOK
Untuk Kios ukuran 1,25 X 3,00 M sebanyak 7 pedagang

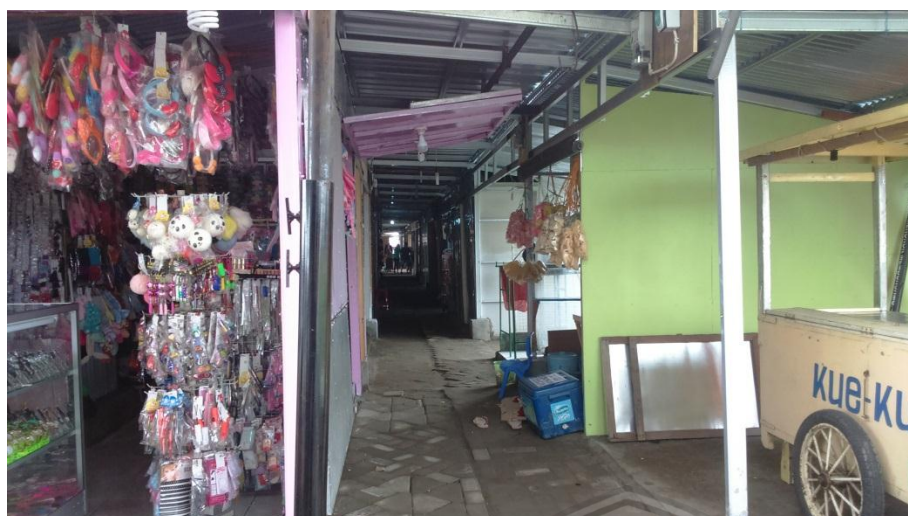
UNDI	NAMA	ALAMAT	PEDAGANG
1	Suncto	Dsn. Plosokuning Ds. Ngabar	Rokok
2	Nur Kasanah	Kradenan Gg. 1/9	Rokok
3	Sili Rochana	Kradenan III/37	Rokok
4	Abdul Chamid	Jl. Puloarjo 3	Rokok
5	Djumakiyah	Dsn. Lespadangan RT. 04 RW.07 Terusan Gedek	Rokok
6	Mochamad. Nasir	Kradenan IV/14A Kel. kauman	Rokok
7	Sn Subakti	Kauman V/16 Mojokerto	Rokok

DAFTAR RELOKASI PEDAGANG ALON-ALOON
JENIS STIKER
Untuk Kios ukuran 1,25 X 3,00 M sebanyak 2 pedagang

UNDI	NAMA	ALAMAT
------	------	--------

Lampiran 6. Wawancara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto**Lampiran 7. Wawancara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto****Lampiran 8. Wawancara pedagang yang direlokasi**

Lampiran 9. Keadaan pasca Relokasi Alun-alun Kota Mojokerto



Lampiran 10 Keadaan pasca Relokasi Jalan Joko Sambang Kota Mojokerto



Lampiran 11. Wawancara dengan Ketua Paguyuban PKL Kota Mojokerto



Lampiran 12 Keadaan Alun-alun Kota Mojokerto pasca Relokasi

